



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

BEKAL MENGANTAR GENERASI

Negara tak pernah ingkar janji memenuhi amanat konstitusi terkait porsi anggaran pendidikan. Kesempatan menikmati layanan telah makin terbuka. Saatnya, sisi kualitatif pendidikan beroleh perhatian. Sebagai bekal anak negeri menghadapi era persaingan tinggi.



Daftar Isi



Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan menjadi fokus pemerintah di APBN 2020. Diyakini, pendidikan merupakan akses utama menuju Indonesia Maju 2045. Terbukanya akses dan meningkatnya kualitas pendidikan kami gambarkan dengan seorang siswa yang sedang membaca di depan pintu.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiani. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistiy, Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, FransiscusEdySantoso, AndiAlHakim, MuhammadFathKathin, AriefKuswanadji, IntanNur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

- 5 **DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 **EKSPOSUR**
- 10 **LINTAS PERISTIWA**
- 14 **TOPIK PILIHAN**
- 15 **TAGAR**

LAPORAN UTAMA

- 17 Memperbaiki Rapor Pendidikan Indonesia
- 20 Infografik
- 22 Perluas Akses, Akselerasi Kualitas
- 25 Utamakan Sasaran Pendidikan
- 27 Menuju Indonesia Maju Melalui Pendidikan Bermutu

TRIVIA

- 29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

- 30 Menggali Potensi Panas Bumi

FIGUR

- 34 Kesederhanaan Sang Inspektur

OPINI

- 37 Mewaspadaai Potensi Disrupsi Libra pada Sistem Keuangan

OPINI

- 40 Peran Teknologi dalam Bidang Hukum

POTRET KANTOR

- 42 Langlang Bahari Jaga NKRI

PROFESI

- 44 Lelaki Pegunungan dalam Kepung Lautan

REGULASI

- 46 *Super Deduction Tax* Untuk Wujudkan SDM Indonesia Unggul

GENERASI EMAS

- 48 Komitmen Tinggi Jadi Kunci

BUGAR

- 51 Sadar Kesehatan Jiwa

RENUNGAN

- 52 Menjadi Pemenang

BUKU

- 53 Kisah Pegawai Kemenkeu Merajut Persatuan

LOKAL

- 54 Kilau Batu Intan Martapura

FINANSIAL

- 56 Ide Sederhana Atur Keuangan Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



GREEN SUKUK RITEL ST006

The 1st Green Sukuk Ritel in The World



Masa penawaran
1 - 21 November 2019



Kupon Mengambang
(floating with floor)



Minimum pemesanan Rp 1 Juta

**LOCK
YOUR
DATE**
1.11.2019

#JadiLebihBijak



Pilih Mitra Distribusi Anda!



Dari Lapangan Banteng

Memperkuat Daya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan, sehat dan berkarakter telah terbukti mampu membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di sinilah peranan penting pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari perjuangan untuk melanjutkan cita-cita pendiri bangsa.

Momentum bonus demografi ini harus dimanfaatkan pemerintah agar bisa keluar dari jerat penghasilan menengah (*middle income trap*). Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, pemerintah akan fokus untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM.

Apa saja yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2020 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia?

Pertama dari sisi kesehatan. Terdapat jutaan warga yang mendapatkan bantuan untuk digratiskan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan. Dengan alokasi dana sebesar RP 48,8 triliun, peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta orang. Dengan program ini, masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat berobat ke rumah sakit secara gratis.



Dari sisi prasarana kesehatan, pemerintah membangun fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 233 buah. Total anggaran kesehatan sebesar Rp 132,2 triliun.

Tak kalah dengan bidang kesehatan, program pemerintah di bidang pendidikan juga sangat banyak membantu masyarakat mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tahun 2020 dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa yang terdapat dalam 271 ribu sekolah umum/madrasah.

Beasiswa dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada siswa SD/SM/SMA atau yang sederajat untuk sebanyak 20,1 juta siswa. Sementara untuk KIP tingkat perguruan tinggi disediakan bagi 818,1 ribu mahasiswa. Dari

sisi infrastruktur pendidikan, pemerintah pusat akan membangun / merehabilitasi 17,8 ribu ruang kelas dengan dana sebesar Rp 7,8 triliun. Total anggaran pendidikan sebesar Rp 508,1 triliun.

Pada tahun 2020 juga akan dimulai pembentukan dana abadi perguruan tinggi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Dana abadi juga akan diadakan bagi kebutuhan penelitian nasional. Dana abadi ini digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset. Melalui dana abadi ini pemerintah yakin dapat membuat Indonesia menjadi lebih maju melalui terciptanya berbagai inovasi baru.

Generasi penerus bangsa harus sehat, pintar dan berdaya juang sehingga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Pemerintah akan terus hadir melalui negara dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya.

Semua fasilitas harus berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak Indonesia untuk sehat, berpendidikan tinggi, dan berkarakter. Inilah janji republik. APBN adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

VESSEL SEARCH COURSE

Petugas Bea Cukai mengikuti pelatihan pengeledahan kapal atau pilot *vessel search course* yang diadakan oleh Jakarta Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Acara ini terselenggara atas kerja sama DJBC dengan Australian Border Force (ABF). Program ini bertujuan untuk melatih pegawai Bea Cukai dalam mengutamakan prosedur keamanan bekerja dan menggunakan manajemen risiko saat menggeledah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba atau barang ilegal lainnya. Selain itu, program ini dapat melatih dalam mengamati lingkungan yang membahayakan dan mengidentifikasi ruang-ruang tertutup.

Foto
Veronica Intan P



TELUR DAN ASIN

Brebes sangat terkenal dengan telur asinnya yang memiliki warna hijau kebiru-biruan. Telur asin Brebes diproses dengan direndam remukan bata dan garam selama kurang lebih empat belas hari, kemudian dibersihkan dan dikukus selama satu jam. Saat ini produksi telur asin Brebes sudah menjadi penggerak ekonomi utama masyarakat Brebes.

Foto
Resha Pratama



14/10 Kemenkeu Tertibkan Pelaku TPT Bermasalah

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menertibkan sejumlah pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk menjamin *good governance* dan menjaga daya saing produk lokal. DJBC selalu melakukan pengawasan baik secara *targeting* maupun sewaktu-waktu. Menkeu menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sinyal bahwa perekonomian Indonesia terus dijaga.

“Dalam kewenangan Kementerian Keuangan yang memang kita nyata-nyata melihat adanya suatu pelanggaran tujuannya juga untuk memberikan *signal* bahwa perekonomian Indonesia terus kita jaga. Kalaupun ada berbagai macam kompetisi dan perkembangan perekonomian dunia termasuk perang dagang kita juga perlu untuk mengantisipasi,” tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarawati dalam Konferensi Pers Upaya Penertiban Tekstil dan produk Tekstil

bertempat di Aula Cakti Buddhi Bakti kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada Senin (14/10).

Industri TPT merupakan salah satu industri yang diharapkan menjadi industri andalan ekspor Indonesia. Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada industri hulu, industri antara (tengah), dan industri hilir. Kapasitas produksi dan investasi industri hulu meningkat namun daya serap industri antara (tengah) di dalam negeri kurang sehingga pasar untuk industri hulu TPT adalah pasar ekspor.

Pemerintah akan terus membuka pintu dalam menerapkan kebijakan terbaik agar dapat tercipta aturan yang inklusif bagi semua pihak, guna menciptakan efisiensi sistem logistik nasional dalam rangka mendorong laju perekonomian Indonesia. Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan akan dibentuk satgas yang melibatkan seluruh pihak yang terkait.

29/09

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pesan Menkeu Kepada Para Mahasiswa Baru PKN STAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) untuk rukun dan saling menghargai mengingat mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Hal itu ia katakan di depan ribuan mahasiswa pada acara Persembahan Mahasiswa Baru Dinamika PKN STAN, hari Minggu (29/09) di Kampus PKN STAN Bintaro, Tangerang Selatan. Acara Dinamika PKN STAN adalah Studi Perdana Memasuki Kampus bagi para mahasiswa baru PKN STAN untuk orientasi para mahasiwa agar bisa lebih mengenal kampus, kebudayaan kampus, peraturan-peraturan di kampus, tata cara perkuliahan dan mengenalkan nilai-nilai luhur. “Kalian harus berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan janji kepada saya. Jadilah pemersatu, jadilah perekat, jadilah orang-orang yang membentuk institusi yang senantiasa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tegas Menkeu.



02/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Resmikan Museum dan Perpustakaan Bea Cukai Loka Wistara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan museum dan perpustakaan Bea Cukai bernama Loka Wistara bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Bea dan Cukai yang ke-73 di lantai dasar Gedung Sulawesi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Rabu (02/10). “Museum adalah tempat untuk kita selalu mengingat. Apa yang terjadi di masa lalu sebagai bekal kita untuk melangkah ke (masa) depan. Melangkah ke depan dengan suasana dan tatapan beda namun ada hal-hal dan ilmu serta prinsip yang sama,” ujar Menkeu. Selain itu, Menkeu juga meresmikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) sebagai pusat komunikasi dan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait pelanggaran di bidang kepabeanan di laut.

01/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Adakan Lomba Olimpiade APBN Tingkat SMA

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sosialisasi, edukasi, serta pemahaman mengenai APBN ke masyarakat melalui lomba Olimpiade APBN untuk tingkat SMA pada Selasa, (01/10) di aula Dhanapala. Hal ini agar APBN makin meluas dipahami oleh generasi muda. Di acara final lomba olimpiade APBN tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merasa senang dengan antusiasme para finalis seperti para finalis dari SMAN 6 Palembang, SMAN 1 Tabanan, dan SMA Al Azhar Mandiri Palu yang berhasil masuk tahap final Olimpiade APBN 2019. “Seluruh total peserta 1.466 sekolah bahkan ada yang dari Jeddah. Ini menggambarkan antusiasme anak-anak SMA untuk bisa berpartisipasi di Olimpiade APBN meningkat luar biasa. Dulu, saya SMA tidak tahu APBN. Jelas kalian generasi yang lebih maju dan negara RI senang karena generasi mudanya lebih baik dari yang sebelumnya,” ungkap Menkeu.





07/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Tiga Prinsip Sikapi Kenaikan Iuran BPJS

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengingatkan agar program BPJS dapat beroperasi secara sehat dan berkesinambungan, maka masyarakat harus berpatokan pada tiga prinsip dasar yaitu: 1) pihak yang kaya membantu yang miskin; 2) pihak yang sehat membantu yang sakit dan 3) Pemerintah Daerah (Pemda) membantu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional yang Universal Health Coverage itu ada tiga yaitu (1) yang kaya membantu yang miskin, gotong royong; (2) yang sehat bantu yang sakit; (3) kerja sama dengan pemerintah daerah. Ini selalu diarahkan Bapak Presiden dan Bapak Wapres, karena namanya Jaminan Kesehatan Nasional adalah pusat dan daerah. Tidak hanya APBN tapi APBD juga. Karena banyak rakyat yang sakit itu di daerah,” tegas Wamenkeu pada acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Tarif Iuran BPJS” di ruang serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (07/10).

10/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Teknologi Digital Pangkas Birokrasi dan Permudah Rakyat Bayar Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa inovasi platform bisnis *e-commerce* seperti yang dilakukan oleh Tokopedia tidak hanya bermanfaat untuk bisnis secara umum, namun terbukti mampu membantu memangkas proses birokrasi pemerintah dan mempermudah masyarakat membayar pajak. “Waktu saya menyampaikan di publik bahwa saya menginginkan membayar pajak semudah atau lebih cepat dari membeli pulsa, *immediately* saya mendapatkan respons tawaran untuk kerja sama dalam waktu yang begitu cepat. Sekarang, saya sudah mendapatkan laporan orang bisa bayar pajak secara cepat semudah beli pulsa melalui Tokopedia atau platform yang lain,” kata Menkeu dalam acara diskusi publik dengan topik “Dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia” di The Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

11/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Kemenkeu Bersih Pantai

Dalam rangka menuju peringatan Hari Oeang tiap tanggal 30 Oktober, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan acara “Kemenkeu Bersih Pantai” di Pantai Tanjung Pasir, Neglasari Tangerang pada Jumat, (11/10). “Cara kita hidup akan menentukan bentuk kualitas dan jumlah sampah. Saat ini Indonesia harus mulai memikirkan tidak hanya memikirkan menumbuhkan ekonomi tetapi juga menangani sampah. Indonesia dikenal peringkat 2 dunia sebagai penghasil sampah plastik di laut. Oleh karena itu, kita perlu terus menciptakan kesadaran dan meningkatkan kesadaran secara sistematis. Kalau kita tidak berpikir strategis dan sistematis menganani sampah maka kita akan hidup dengan sampah,” papar Menkeu Sri Mulyani. Sebagai informasi, kegiatan tersebut melibatkan sekitar 300 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Keuangan, mahasiswa, dan anggota Jakarta Angler Community serta perwakilan Bupati. Tangerang.



18/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Aplikasi SMART Legal Drafting, Terobosan Kemenkeu dalam Reformasi Hukum

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menekankan agar para aparatur sipil negara (ASN) dapat merubah *mindset* dalam bekerja dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil. Dalam konteks reformasi dan otomatisasi peraturan perundang-undangan, diharapkan para ASN mampu membuat peraturan yang sinergi, selaras, harmonis, dan tidak menimbulkan kontroversi atau penentangan dari masyarakat ketika peraturan tersebut diterapkan. Hal ini disampaikan Wamenkeu pada acara Seminar Reformasi Hukum di Bidang Keuangan Negara di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/10). “Reformasi di bidang hukum ini harus *goal oriented* bukan *process oriented*,” tegas Wamenkeu menggarisbawahi pesan Presiden. Terobosan yang dilakukan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkeu dengan mengoptimalkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi SMART Legal Drafting (SMART LD) sangat diapresiasi oleh Wamenkeu.

15/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro Organta

Kemenkeu Terima Penghargaan Top 45 Inovasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diwakili oleh Staf Ahli Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto menerima penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN dan BUMD di Istana Wakil Presiden Selasa, (15/10). Inovasi Kementerian Keuangan yang berhasil lolos dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik adalah Inovasi Internship dan Secondment bagi Pemda (Inovasi IdS) yang dikelola oleh Direktorat Jendereal Perimbangan Keuangan (DJPK). Inovasi IdS merupakan pendekatan baru dan *framework* unik yang dikembangkan oleh DJPK untuk meningkatkan kapastitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan keuangan daerah dan melakukan pembelajaran terhadap keberhasilan daerah lain. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat seperti dengan adanya pengetahuan dan teknologi sehingga Indonesia tidak lagi banyak mengandalkan sumber daya alam tapi juga sumber daya manusia.



Meracik Tekstil Jadi Andalan

Teks Reni Saptati D.I

Pemerintah terus berupaya menggenjot nilai ekspor untuk memperbaiki neraca perdagangan. Salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi andalan ekspor Indonesia ialah industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada industri hulu, industri antara (tengah), dan industri hilir. Hal lain yang turut menekan sektor industri tersebut yaitu tidak adanya pembatasan untuk impor pakaian jadi.

Dalam konferensi pers upaya penertiban TPT pada pertengahan Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya terus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi, tetap mendukung industri dalam negeri dan menjaga tata kelola dari para pelaku ekonomi. Di sisi lain, ia juga memahami bahwa tantangan dan tekanan yang berasal dari perdagangan internasional harus terus diwaspadai.

Untuk membendung banjir impor TPT di Indonesia, Kementerian Keuangan menertibkan sejumlah pelaku industri TPT untuk menjamin *good governance* dan menjaga daya saing produk lokal. Hal ini juga merupakan jawaban atas keluhan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Langkah nyatanya, Kementerian Keuangan memblokir izin 330 importir “nakal” dan menciptakan *safeguard*.

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, mengatakan penyimpangan yang terjadi tidak hanya disebabkan impor yang dilakukan melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), tetapi juga disebabkan adanya dugaan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang memindahtangankan bahan baku TPT kepada pihak lain. Untuk itu, perusahaan importir yang terbukti melakukan pelanggaran importasi TPT telah ditindak tegas oleh DJBC.

Terkait dengan *safeguard*, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) TPT. Karena kebijakan akan menuai pro kontra, pemerintah harus menentukan mana yang akan dilindungi dalam jangka pendek.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Wisnu Wardhana, mengatakan pemerintah sedang melakukan upaya bertahap memperkuat industri TPT dalam negeri. Persoalan industri TPT nasional yang kompleks memerlukan penanganan yang komprehensif. Menurutnya, perlindungan perdagangan menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk

memperkuat industri tersebut.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengapresiasi langkah tegas penindakan terhadap pelaku industri TPT yang bermasalah. Menurutnya, meski kontribusi impor PLB hanya 4,7 persen dari total impor tekstil secara keseluruhan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi pasar dalam negeri. Lebih lanjut, ia berharap, pemerintah dapat mempercepat aturan bea masuk sementara terhadap jumlah TPT per kilogram atau *safeguard* dalam revisi Permendag 64/2017.

Isu lain yang menjadi sorotan masyarakat dalam penertiban TPT ini yaitu pengetatan jumlah barang kiriman. Hal tersebut dilakukan sebab muncul indikasi ada perpindahan impor garmen ke kanal lain seperti barang kiriman dan jasa titipan (*jastip*). Barang kiriman garmen akan dibatasi dari semula 10 buah menjadi 5 buah. Pengetatan importasi tekstil ini dilakukan demi menutup kebocoran impor TPT di pasar sehingga sektor indusri ini ke depannya mampu menjadi andalan ekspor Indonesia.

Foto
Resha Aditya P

-  www.kemenkeu.go.id
-  [KemenkeuRI](#)
-  [@KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [majalahmediakeuangan](#)

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.



@majalahmediakeuangan Sampaikan singkat optimisme Anda terkait upaya pemerintah dalam melindungi dan memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar bisa bersaing dalam perdagangan internasional



Like

Reply



@yahyafadhilmi ... menciptakan safeguard artinya fokus pada kekuatan dan pemulihan dari kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Pemulihan tersebut secara langsung dapat bersaing dalam perdagangan internasional.



@writingproject.mima 1. Membatasi TPT dari luar dengan regulasi; 2. Pemerintah Indonesia bisa mendukung TPT dengan regulasi TPT ber-SNI. Sehingga persaingan pasar (baik lokal maupun internasional) menjadi lebih adil.



@kadekmeaadi Memperkuat industri TPT dalam negeri merupakan langkah yang tepat dilakukan karena optimisme untuk bersaing tidak akan timbul jika internal sendiri masih terlihat lemah. Kekuatan dan rasa percaya diri dari internal sendiri merupakan optimisme menghadapi persaingan global



@KemenkeuRI Sampaikan harapanmu terhadap inisiatif pemerintah menggulirkan program KIP Kuliah dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia.



Like

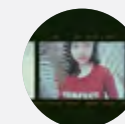
Reply



@asaiska Anggaran pendidikan Indonesia sama dengan Vietnam yaitu 20% dr APBN tapi Vietnam peringkat 8 terbaik dunia sedangkan Indonesia berada di peringkat 53 (WEF). Keseriusan pemerintah harus diiringi dgn pengawasan dan perbaikan ekosistem pendidikan



@masmyuu Tak hanya penerimanya saja. Namun sasarannya merata. Dan untuk penerima KIP Kuliah juga perlu dilakukan survey lapangan agar kelak penerima memang benar orang yg berhak.



@LoisKristy Program KIP Kuliah ini menurut saya sangat bagus untuk menunjang peningkatan kualitas SDM di indonesia. Harapan saya semoga KIP Kuliah digunakan untuk orang yang benar-benar tidak mampu, namun memiliki semangat yang luar biasa dalam menempuh pendidikannya.

MEMPERBAIKI RAPOR PENDIDIKAN INDONESIA

Tawa renyah sekumpulan bocah terdengar dari kejauhan. Gemuruh langkah kaki saling bekejaran. Seraya mengusap peluh, beberapa anak berlari secepat yang mereka bisa. Berharap lebih dulu sampai ke gedung sekolah.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir dan memastikan, agar tawa riang anak-anak negeri bisa terus ada. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan anak Indonesia akan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Amanat konstitusi pun dijalankan. Satu dasawarsa sudah, porsi anggaran pendidikan tak pernah kurang dari 20 persen dari total belanja negara.

Namun, besarnya investasi negara pada bidang pendidikan masih menyisakan tantangan yang perlu dituntaskan. Bersama negara, seluruh pihak diharapkan bisa ambil peran memajukan pendidikan Indonesia. Sebab, impian tentang Indonesia maju dan berdaya saing adalah milik bersama yang pantas diwujudkan.

Satu dasawarsa

Sepuluh tahun, sejak amandemen UUD tahun 1945 mengamanatkan porsi 20 persen APBN untuk pendidikan. Sebagai dampaknya, alokasi anggaran pendidikan saat ini menempati urutan pertama sebagai belanja negara paling besar dalam APBN. Untuk tahun ini saja, total anggaran yang dikucurkan pemerintah pada sektor pendidikan mencapai Rp508,1 triliun. Apabila diakumulasikan sejak 2009, maka porsi anggaran pendidikan hingga sekarang hampir menyentuh angka Rp4.000 triliun.

Direktur PAPBN Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta Wibawa mengungkapkan melalui porsi anggaran tersebut, pemerintah pada awalnya berfokus pada keterbukaan akses pendidikan. Hal ini

Generasi muda sebagai aset menuju Indonesia Emas

Foto
Resha Aditya Pratama

dimaksudkan, agar tak satupun masyarakat Indonesia terhalang dari kesempatan menikmati fasilitas dan layanan pendidikan.

“Makanya lebih pada upaya untuk menambah fasilitas sekolah yang terjangkau. Sekolahnya gratis. Lalu, orang mau datang ke sana (untuk belajar),” jelas Kunta.

Terkait hal ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Berdasarkan data publikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018/2019 capaian APK Indonesia untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing 103,54 persen, 100,8 persen, dan 88,55 persen. Sementara untuk capaian APM, masing-masing sebesar 91,96 persen, 75,64 persen, dan 67,29 persen. Meski belum menggembirakan, berdasarkan data bank dunia, rasio partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah Indonesia setara dengan kebanyakan negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pendidik sekaligus inisiator Gerakan Semua Murid Semua Guru, Najelaa Shihab cukup mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, utamanya dalam mendorong akses pendidikan. Menurutnya, pemerintah sudah memperhatikan masalah ketimpangan kesempatan pendidikan khususnya untuk anak-anak yang kurang beruntung, baik dari segi geografis maupun status ekonomi dan sosial.

“Pendidikan di wilayah 3T semakin diperhatikan, dan Kartu Indonesia Pintar juga menjadi salah satu solusi untuk membantu anak Indonesia tetap bersekolah. Selain itu, kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas juga diharapkan meningkat dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi,” terangnya.

Belum optimal

Meski demikian, besarnya alokasi anggaran tak serta-merta memberi hasil

memuaskan bila tidak diikuti dengan kebijakan yang relevan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, investasi pada sumber daya manusia jika diterjemahkan pada sisi kebijakan pemerintah, memiliki dua arti. Selain dari sisi anggaran, sisi kebijakan pada bidang terkait sama pentingnya.

“(Yaitu), kebijakan mengenai pendidikan, kebijakan mengenai *research*, kebijakan mengenai kesehatan, dan kebijakan untuk menjaga (agar) jangan ada masyarakat Indonesia yang tertinggal. Itu termasuk bagian yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia,” jelasnya.

Apabila diukur dari sisi kualitatif, pendidikan Indonesia memang masih terbilang rendah. Human Capital Index (HCI) yang diterbitkan World Bank dalam World Economic Forum pada 11 Oktober 2018 lalu menempatkan Indonesia di posisi ke-65 di dunia dan posisi ke-6 di Asia Tenggara. Sementara untuk Human Development Index (HDI), Indonesia bersama Vietnam menempati posisi ke-6 di kawasan Asia Tenggara dengan skor 0,694. Adapun Singapura, Malaysia, dan Thailand jauh lebih unggul. Mereka menempati posisi tiga teratas dengan menyandang *High Human Development*, sedangkan Indonesia masih bertahan pada predikat Medium Human Development.

Berkaca pada indikator lain, Kemendikbud merilis capaian Indonesia untuk skor Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2016. Survei dilakukan oleh OECD tiap tiga tahun sekali kepada pelajar berusia 15 tahun di 72 negara. Penilaian PISA difokuskan pada tiga bidang, meliputi kemampuan sains, membaca dan matematika.

Rilis Kemendikbud menyebutkan, berdasarkan survei PISA Indonesia mengalami kenaikan capaian pendidikan sebesar 22,1 poin dibandingkan survei sebelumnya pada 2012. Indonesia disebut menempati posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid diantara 72 negara lainnya yang disurvei.

Namun skor PISA Indonesia diketahui masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Bahkan berada di bawah Vietnam yang pada 2015 memiliki skor PISA di atas negara-negara OECD. Padahal, bila dicermati dari besarnya anggaran pendidikan, Vietnam hanya memiliki setengah dari PDB per kapita Indonesia, dengan proporsi anggaran pendidikan yang sama, sebesar 20 persen dari APBN.

Dongkrak kualitas

Menanggapi hal ini, Najelaa Shihab menuturkan, hasil tes internasional seperti PISA memperlihatkan banyaknya hal yang perlu dibenahi terkait kualitas pendidikan Indonesia. “Sudah tidak tepat jika kita hanya fokus pada akses atau angka partisipasi pendidikan saja. Tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas. (Jika demikian), institusi pendidikan tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kunta Wibawa. Dia menuturkan, pemerintah kini tengah melangkah pada tahap berikutnya dengan lebih berfokus pada perbaikan kualitas pendidikan. Menurutnya, terdapat tiga unsur penting terkait kualitas pendidikan, yaitu kualitas guru, kualitas anak didik, dan kualitas kurikulum.

Terkait poin pertama, Kunta menyebutkan, program sertifikasi guru yang selama ini berjalan tengah dievaluasi efektivitasnya dalam memperbaiki kualitas guru Indonesia. Berdasarkan data Kemdikbud, hasil uji kompetensi guru (UKG) pada 27 propinsi di Indonesia diketahui belum optimal. Pencapaian UKG sejak 2015 hingga 2017 masih berada di bawah 70 dari nilai maksimal 100.

Selanjutnya dari sisi kualitas anak didik. Kunta menuturkan kualitas ini berkaitan dengan kemampuan membaca, kemampuan mencerna bacaan, serta keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Sependapat dengan Kunta, Najelaa Shihab mengakui literasi menjadi tantangan pendidikan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

“(Yaitu) kompetensi yang tidak hanya

mengenai kemampuan membaca secara mekanik, tetapi juga memahami, menganalisis, serta menilai kualitas teks. Kemampuan ini sangat penting, dan sayangnya masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang kurang mengembangkan kompetensi literasi ini,” sesalnya.

Lebih lanjut Najelaa mengeluhkan, lambatnya sistem pendidikan dalam berkembang mengikuti kecepatan zaman. “Kita perlu sadar bahwa ke depan Indonesia diciptakan dengan mendidik anak untuk memiliki kompetensi yang holistik, tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga keterampilan kolaborasi, daya refleksi, empati, dan sebagainya,” sebut Najelaa.

Pendapat ini senada dengan poin ketiga yang disebutkan Kunta, yakni pada aspek kurikulum. Menurut Kunta, kurikulum terutama yang mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan mutlak diperlukan. Terlebih bila Indonesia serius hendak menyiapkan generasi yang berdaya saing di era revolusi industri 4.0.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengkritis sistem pendidikan Indonesia yang dinilai kurang mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. “Kalau kita, *approach* pendidikan kita lebih banyak menghafal. Orang tidak memiliki minat untuk menjadi *curious* karena dia hanya *memorizing*. Kemudian, pada saat mereka menjadi dewasa juga *template* di dalam *mindset*-nya menjadi tidak memunculkan kapasitas untuk *curious* itu. Maka kita sering mengatakan (perlu) sistem pendidikan yang berbasis kepada *critical thinking* guna melatih anak-anak untuk berfikir kritis,,” ungkap Menkeu.

Sependapat dengan Menkeu, Najelaa Shihab menilai penguatan



kurikulum dan asesmen yang utuh mutlak diperlukan. Menurutnya, kurikulum dan asesmen seharusnya menysar pada pengembangan kompetensi dalam melakukan aksi dan menyelesaikan masalah, bukan pada banyaknya materi yang harus diingat anak didik.

“Indikator keberhasilan inilah yang seharusnya juga mewarnai penilaian ataupun akreditasi dan sertifikasi bagi sekolah dan guru,” harapnya. Dia melanjutkan, dengan diubahnya konsep asesmen, maka kurikulum dan proses belajar (pedagogi) akan lebih berfokus pada kompetensi, bukan pada kegiatan menghafal seperti sekarang.

Merencanakan agenda besar

Pada sisi lain, pemerhati pendidikan, Indra Charismiadiji menilai, segala permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan di Indonesia tidak lain karena belum adanya cetak biru atau peta jalan yang memuat perencanaan secara holistik mengenai arah dan target pendidikan Indonesia. Cetak biru ini

berguna sebagai panduan bagi institusi pemerintah yang terkait bidang pendidikan dalam menjalankan target dan capaian yang ditetapkan. Menurut Indra, cetak biru ini telah dimiliki Malaysia dan Singapura.

“Singapura saja yang cuma 300 sekolah, itu memiliki *blueprint* ICP (International Class Program), pendidikan yang berbasis teknologi. Ini sudah masuk fase ke-4. Dia (Singapura) mulai dari tahun 97,” jelasnya. Dalam menyusun cetak biru, lanjutnya, Indonesia bisa menunjuk tim khusus, atau menggandeng konsultan asing seperti yang dilakukan Malaysia yang telah lebih dulu melakukan.

Pentingnya cetak biru juga diamini Najelaa Shihab. Menurutnya, cetak biru akan menjadi referensi dalam mengalokasikan anggaran secara akuntabel. Meski demikian, dia menekankan agar segala kebijakan dan program yang hendak dibuat selalu berpihak pada anak didik selaku subjek pendidikan. “Jangan sampai ada kebijakan yang merugikan anak karena menempatkan pihak lain sebagai fokus utama,” tekannya.

Lebih jauh dia mengatakan, kebijakan yang berpihak pada anak harus berlaku pada setiap aspek, baik yang terkait dengan guru, kurikulum, hingga alokasi anggaran. “Artinya prioritas harus diberikan pada agenda-agenda yang benar-benar memberi dampak pada peningkatan kualitas belajar anak,” tandasnya.

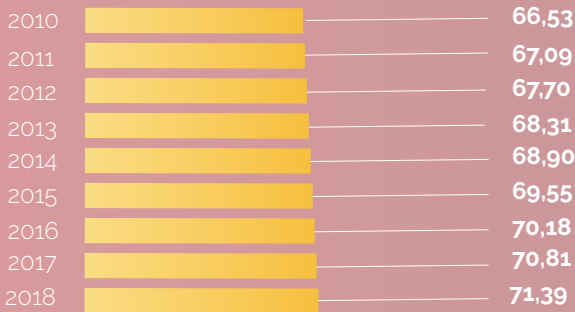
Teks Farida Rosadi

Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing

Roadmap 2045 Indonesia Negara Maju



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia



Pemerintah serius untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Melalui anggaran pendidikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, seluruh program digunakan untuk mempersiapkan generasi muda untuk dapat bersaing di kancah global dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia sebagai negara maju.

2020 – 2030

Penguatan Pondasi:
Penguatan Daya Saing

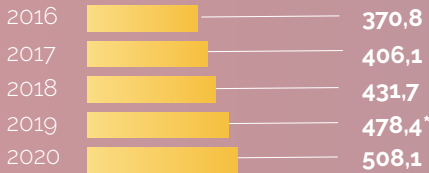
2031 – 2035

Transisi:
Memperkokoh Daya Saing

2036 – 2045

Indonesia Maju :
Negara Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur

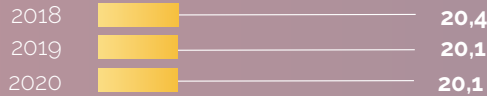
Anggaran Pendidikan dalam APBN (dalam triliun)



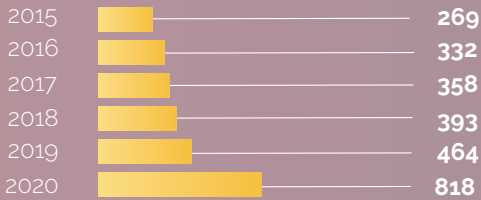
*outlook

Sumber:
Badan Pusat Statistik
Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar (juta siswa)



Jumlah Penerima KIP Kuliah (ribu orang)



Kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2020

- Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi
- Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui Kartu Pra kerja (pelatihan dan insentif).
- Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah

Sasaran Penerima KIP Kuliah di tahun 2020

- Lanjutan Bidik Misi : 398 ribu mahasiswa
- Penerima mahasiswa baru: 420 ribu mahasiswa
- Bantuan pendidikan: Biaya hidup 4,2 juta rupiah/mhs/smt & biaya pendidikan 2,4 juta rupiah/mhs/smt

Alokasi Anggaran pendidikan tahun 2020



Rp6,7 triliun

Kartu Indonesia
Pintar (KIP) Kuliah



Rp1,5 triliun

Riset yang dilakukan
oleh
Kemenristekdikti



Rp1,8 triliun

beasiswa S2/S3
LPDP



Rp63,0 triliun

Bantuan
Operasional Sekolah



Rp307,6 miliar

Pembangunan
sarana dan
prasarana PAUD



Rp11,2 triliun

Kartu Indonesia
Pintar (KIP)
SD/SMP/SMA
sederajat



Rp284,1 miliar

Riset yang dilakukan
oleh LPDP



Rp4,5 triliun

Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
BOP PAUD atau disebut
DAK Non Fisik



Rp4,4 triliun

pembangunan/rehabilitasi
kampus



Rp7,8 triliun

pembangunan/rehabilitasi
ruang kelas



PERLUAS AKSES, AKSELERASI KUALITAS

Indonesia, negeri gemah ripah loh jinawi. Keindahan alamnya bak surga dunia, beraneka rupa dengan sebaran lokasi dari ujung Aceh hingga buncit Papua. Kekayaan alamnya melimpah sampai-sampai rumit dihitung saking banyaknya.

Wilayah perairan terbentang luas beserta seluruh isi. Migas dan batu bara tersedia di Sumatera dan Kalimantan, mineral dan batuan melembak di Jawa dan Bali. Aneka tambang lain jamak ditemukan di Sulawesi, tempat vulkanisme, dan tektonisme beraktivitas tinggi. Belum lagi Papua, pulau berjubel emas dan tembaga.

Tiada habis kalimat untuk menggambarkan berlimpahnya sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Namun, sayangnya, kemewahan anugerah SDA ini belum mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Dalam dunia yang makin kompetitif, kita masih belum

Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Foto Anas Nur Huda

bisa menjadi yang terdepan. *The Global Competitiveness Report 2019* yang baru-baru ini dikeluarkan World Economic Forum menunjukkan peringkat daya saing Indonesia masih berada di posisi ke-50, di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (27), dan Thailand (40).

Pembangunan pendidikan menjadi kunci

Kekayaan alam yang luar biasa ternyata bukan jaminan utama. Pemerintah menyadarinya betul. Bahwasanya ketersediaan SDA tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung sumber daya manusia berkualitas. Hal ini ditegaskan Kunta Wibawa Dasa Nugraha selaku Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran. “Sumber daya manusia (SDM) sekarang menjadi *concern* kita, karena kalau kita lihat negara bisa maju, itu didukung oleh SDM-nya, bukan dari SDA-nya.”

Kunta mengungkapkan sejak 2009, proporsi anggaran pendidikan dipatok 20 persen dari belanja negara. Menengok ke belakang, Kunta menjelaskan manakala mula-mula amanat konstitusi tersebut dilaksanakan, anggaran pendidikan diarahkan supaya masyarakat dapat mengakses pendidikan. Program beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kala itu diberikan dengan harapan anak usia sekolah dapat sekolah secara gratis. “Kita ingin membuat mereka punya akses ke sana, maka kebijakan pendidikan saat itu lebih kepada upaya untuk menambah fasilitas baik di SD, SMP, maupun SMA. Semua dibuat terjangkau dan gratis.”

Akses pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa, bukan privilese yang dimiliki sebagian golongan. Semangat ini yang diusung tatkala menggulirkan Program Indonesia Pintar dan BOS. Pemerintah bertekad mendongkrak angka partisipasi murni masyarakat pada pendidikan dasar dan menengah. Pada 2019, Program Indonesia Pintar ditarget menjangkau 20,1 juta jiwa dan BOS menggapai 57 juta jiwa.

Tak hanya itu, beasiswa Bidikmisi dimunculkan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kesempatan dibuka luas bagi masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. Sebab, pembangunan pendidikan diyakini menjadi kunci utama untuk mengangkat derajat bangsa ini.

Tiga program prioritas

Satu dasawarsa amanat konstitusi diterapkan, menurut Kunta pendidikan telah lebih mudah diakses. Pada 2018, angka partisipasi murni nasional level SD tercapai 91,96 persen, SMP 75,64 persen, serta SMA/K 67,29 persen. Memasuki tahun 2020, pemerintah pun mulai lebih berkonsentrasi pada akselerasi kualitas. “Kita harus mulai melakukan perbaikan SDM kita supaya kita bisa lebih punya inovasi, bisa bersaing, dan produktivitasnya tinggi,” tutur Kunta. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah masih menjaga komitmen pemerataan akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mempertahankan program KIP dan BOS.

Anggaran pendidikan pada tahun depan menyentuh nominal Rp508,1 triliun. Alokasinya terbagi untuk belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp306,9 triliun, dan investasi pembiayaan (Dana Abadi) Rp29 triliun. Ada yang beda dibanding tahun sebelumnya; tiga program pendidikan menjadi prioritas. Pertama, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 818,1 ribu mahasiswa, sebagai pengganti sekaligus penyempurna program Bidikmisi. Anggaran sebesar Rp6,7 triliun dipersiapkan untuk menciptakan generasi muda berkualitas.

Kedua, peluncuran Kartu Prakerja untuk menjawab tantangan di era industri 4.0 serta mengatasi rendahnya produktivitas pekerja. Program dengan anggaran sebesar Rp10 triliun ini disiapkan guna menghilangkan gap antara



“Kita harus mulai melakukan perbaikan SDM kita supaya kita bisa lebih punya inovasi, bisa bersaing, dan produktivitasnya tinggi. ”

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Direktur Penyusunan APBN

kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. “Upayanya adalah bagaimana kita harus mempunyai *link and match* dengan industri,” ujar Kunta. Para penerima manfaat yang ditargetkan sebanyak 2 juta akan mendapatkan penguatan *skilling* dan *reskilling* dalam rangka akselerasi penyerapan tenaga kerja muda.

Ketiga, investasi pembiayaan dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan. “Dana Abadi ini adalah dana untuk pendidikan atau *intergenerational education transfer*,” jelas Kunta. Tujuannya untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi. “Kita menggeser sebagian anggaran untuk dimasukkan ke dalam Dana Abadi, dengan harapan untuk pendidikan anak-anak kita di masa depan, karena mungkin kebutuhan nanti lebih besar daripada sekarang,” lanjutnya.

Selain Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan Dana Abadi Penelitian yang sudah ada sebelumnya, dua inisiatif baru muncul pada 2020, yakni Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dana Abadi Kebudayaan didasari pada keinginan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi penerus bangsa. Sementara, Dana Abadi Perguruan Tinggi dilandasi niatan mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia.

Dorong *link and match*

Era industri 4.0 di depan mata. Jika tak ingin tergerus zaman, SDM Indonesia perlu memiliki keahlian, jiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Strategi peningkatan produktivitas dilakukan melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ismunandar mengutarakan, “Kualitas artinya proses pendidikannya apakah berkualitas. Relevan artinya yang dipelajari itu apakah relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan, dan kebutuhan industri. Ini masih terus kita tingkatkan.”

Kerja sama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dilakukan melalui kebijakan *link and match*. Diperkirakan, bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Untuk itu, Ismunandar menyebut bidang tersebut menjadi salah satu prioritas Kemenristekdikti dalam program KIP Kuliah.

Untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, Ismunandar mengungkapkan Presiden Joko Widodo juga berpesan agar program-program pendidikan bidang baru yang relevan dengan kebutuhan kekinian harus segera dibuka. “Perguruan tinggi kita harus menyediakan sumber daya manusia di bidang-bidang baru seperti *big data*, *data science*, *artificial intelligence*. Itu perlu segera didahulukan.”

Kualitas pendidik

Menurut Ismunandar, peningkatan kualitas berarti bicara peningkatan kualitas pendidik. “Saya percaya kualitas pendidikan tidak bisa lebih tinggi dari kualitas dosennya atau gurunya. Di sekolah berarti gurunya, di kampus berarti dosennya. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dosen.”

Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah memperhatikan tiga unsur utama, yaitu guru, murid, dan kurikulum. Oleh sebab itu, anggaran pendidikan juga mengalokasikan dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemberian fasilitas bagi murid untuk mengakses pengetahuan, dan penyusunan kurikulum yang tepat dengan kebutuhan.

Untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran, terang Kunta, pemerintah melakukan evaluasi yang dikenal dengan *Public Expenditure Review*. “Kita lihat, evaluasi, dan diskusikan dengan Bappenas, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, termasuk Ditjen Perimbangan Keuangan. Kita membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan seperti apa.”

Perkuat koordinasi

Sebagian dari porsi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN disalurkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dari tahun ke tahun, jumlah alokasi anggaran pendidikan melalui TKDD terus bertambah. Tahun 2015 masih berkisar di angka Rp254,9 triliun, sedangkan pada 2020 nanti menjangkau Rp306,9 triliun. Jenis dananya pun semakin beragam, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Otonomi Khusus. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Putut Hari Satyaka menyatakan, “Untuk menjaga kualitas belanja bidang pendidikan maka tiap komponen TKDD bidang Pendidikan ditujukan untuk penggunaan yang berbeda.”

Dengan adanya dukungan pendanaan APBN untuk anggaran pendidikan melalui TKDD, jelas Putut, maka amanat pemenuhan *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar 20 persen juga harus dipenuhi

oleh APBD. “Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan di seluruh daerah merata kuantitas dan kualitasnya,” terangnya.

Pemenuhan *mandatory spending* anggaran pendidikan, menurut Putut, menjadi kompleks bagi sebagian daerah lantaran kapasitas fiskal yang terbatas. Selain itu, sebagian besar dukungan pendanaan justru berupa DAU yang bersifat *block grant*. Dalam artian, penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belum seragamnya manajemen pelaksanaan anggaran pendidikan melalui TKDD di daerah menjadi hambatan lain yang ia hadapi. Putut juga menilai alur koordinasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah daerah belum tertata sehingga sulit bagi pemerintah untuk mensinkronkan kebijakan sektor pendidikan dengan kebijakan di daerah.

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji turut menyoroti tantangan pendidikan Indonesia. Ia menilai kolaborasi dan koordinasi antar instansi masih minim. Selain itu, masih terdapat aturan dan kebijakan pendidikan yang bertabrakan atau tumpang tindih. Dalam menghadapi era industri 4.0, ia menyebut perlunya reorientasi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Hal utama yang ia garis bawahi ialah perlunya segera membuat cetak biru atau *blueprint* pendidikan nasional sebagai acuan seluruh instansi terkait dalam membuat program kerja.

Teks Reni Saptati D.I

Laporan Utama

UTAMAKAN SASARAN PENDIDIKAN

Pemerintah terus melakukan perbaikan sisi belanja. Alokasi dan distribusi anggaran pendidikan dibenahi. Program-program dalam bidang pendidikan makin hari makin didandani. Titah undang-undang untuk mengalokasikan 20 persen belanja untuk pendidikan, dipenuhi dari waktu ke waktu. Perhatian ditumpahkan pada berbagai tujuan perbaikan. Peningkatan sarana pendidikan, penyediaan prasarana, tunjangan profesi pendidik, sampai ragam rupa beasiswa yang dapat dicicip oleh siapa saja.



“Indonesia Pintar itu sangat membantu anak-anak (siswa). Yang tadinya tidak bisa beli buku, jadi bisa beli buku.”

Nani Rahakbauw
Kepala Sekolah
Menengah Pertama
(SMP) Negeri 1 Tual

Membangun semangat baru

Nani Rahakbauw, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tual menyatakan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah. Kendati demikian, ia mengakui bahwa dalam implementasinya, mekanisme penyaluran dana pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang masih perlu ditingkatkan. Ia mengatakan bahwa tingkat kebutuhan di Indonesia yang tidak merata perlu dipertimbangkan dalam mekanisme distribusi anggaran pendidikan. Ia menggambarkan dengan kebutuhan biaya fotokopi. “Saya kasih contoh, fotokopi di Tual per lembar 500 rupiah,” ia melanjutkan, “jadi kita pada saat UTS (Ujian Tengah Semester), fotokopinya bisa berjuta-juta. Kalau di Jawa seribu rupiah bisa dapat banyak, di sini baru dapat dua lembar.”

Lain halnya dengan Program Indonesia Pintar (PIP), Nani berpendapat bahwa program ini sangat membantu. Menurutnya, sebelum adanya PIP tak jarang ia menemui siswa yang enggan ke sekolah karena malu, bukan semata tak mau. “Dia (siswa) bukan malas tapi dia malu, mungkin sepatunya rusak, bajunya sudah kuning” katanya. Ia melanjutkan, “Indonesia Pintar itu sangat membantu anak-anak (siswa). Yang tadinya tidak bisa beli buku, jadi bisa beli buku.” Dengan adanya PIP pula, ia mengatakan siswa yang sempat enggan ke sekolah jadi lebih bersemangat. “Artinya bisa memakai pakaian yang layak itu bisa memberikan semangat buat dia.”

Tak sampai di situ, Nani juga mengatakan bahwa adanya PIP

berdampak pula pada efektivitas kegiatan belajar mengajar dari sisi guru. Menurutnya, para guru di sekolahnya jadi lebih mudah dalam menyampaikan pelajaran karena siswa telah terfasilitasi. Perbaikan ini tentu sebuah kabar baik bagi Indonesia yang sedang fokus membangun generasi masa depannya.

Tak surut prestasi

Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bentuk dari PIP juga tak minim prestasi. Mulai dari prestasi akademik maupun non akademik. Tak sedikit kisah-kisah siswa penerima KIP yang menorehkan prestasi. Sebutlah Essa Nurlian, atlet karate muda dari SMA Negeri 11 Depok yang berhasil melanjutkan mimpinya berkat KIP. Ada pula Rani Nursita dari SMK Negeri 1 Pacet yang sukses menjuarai Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional pada 2018. Sebelumnya, duet dari SMA Negeri Bali Mandara, Bagus Putu Satria Suarima Putra dan I Made Radikia Prasanta bahkan mengharumkan nama Indonesia dalam ajang International Science and Engineering Fair di Los Angeles, Amerika Serikat pada 2017 silam.

SMA Negeri Bali Mandara, kata Bagus Putu, merupakan sekolah yang memang diarahkan untuk menampung siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sekolah ini merupakan sekolah asrama, yang mana segala biaya pendidikan dan biaya hidup ditanggung oleh pemerintah. Bagus Putu mengatakan bahwa ia benar-benar merasakan dampak dari alokasi dana pendidikan. Beasiswa bagi siswa kurang mampu, menurutnya, benar-benar memiliki dampak positif. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya KIP. “Sangat membantu, karena bisa menambah keperluan untuk sekolah,” katanya menceritakan kesan atas KIP. Sebelumnya, ia mengaku menerima beasiswa dari pemerintah pada saat duduk di bangku SMP.

Sebagai seorang yang menikmati kepedulian pemerintah pada putra-putriya, ia berharap kelak pengelolaan dana pendidikan dapat lebih tepat sasaran. Menurutnya, prioritas penerima alokasi dana pendidikan adalah untuk bantuan kepada mereka yang kurang mampu sekaligus berprestasi. “Yang pintar-pintar tidak selalu berasal dari kelas menengah ke atas. Bisa yang dari menengah ke bawah itu ada kemampuan, cuma kesempatan dia tidak punya,” katanya.

Teks A. Wirananda



Prof. Dr.
Ismunandar -
Dirjen Belmawa
Kemenristekdikti

Foto
Venggi Obdi
Ovisa

MENUJU INDONESIA MAJU MELALUI PENDIDIKAN BERMUTU

Keseriusan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia juga ditandai dengan mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan tahun 2020 untuk mendanai riset dan beasiswa sampai dengan jenjang kuliah. Seperti apa upaya-upaya pemerintah dalam hal ini? Simak wawancara Media Keuangan bersama Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ismunandar.

Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini?

Dilihat dalam waktu 74 tahun kemerdekaan, pendidikan kita meningkat pesat sekali. Dari sisi akses, angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi kita saat ini sudah 35 persen. Artinya orang usia kuliah, yang benar-benar kuliah sudah 35 persen. Ini sebenarnya capaian yang besar walaupun di sisi kualitas dan relevansi masih perlu terus ditingkatkan. Kita sendiri menargetkan

angka tersebut menjadi 50 persen dalam 5 tahun ke depan, selain terus meningkatkan kualitas dan relevansi.

Apa saja tantangannya sehingga capaian kita belum sebesar negara tetangga?

Kuota penerimaan perguruan tinggi kita masih kecil, walaupun banyak dari sisi jumlah. Secara total, perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.700-an. Namun, banyak perguruan tinggi yang kapasitas mahasiswanya tidak terlalu besar, sekitar 100-an. Kami ingin membangun perguruan tinggi yang kuotanya banyak dan kualitasnya juga baik. Saat ini peran swasta sudah besar. Sekitar 60 persen dari mahasiswa kita kuliah di swasta. Kita juga terus dorong mereka meningkatkan kualitas.

Bagaimana cara pemerintah agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri sekarang?

Arahannya adalah (prioritas) pada prodi-prodi

STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Lalu yang kedua, bidang-bidang yang “kekinian” diperbolehkan, misalnya bisnis tapi bisnis *digital, marketing* tapi *digital marketing* atau, semacamnya. Itulah yang menjadi *priority*. Tentu yang *social science* tetap ada porsinya juga.

Berikutnya, penerima Bidikmisi adalah mahasiswa yang kuliah di prodi yang terakreditasi minimal B. Hal ini untuk menjamin supaya mereka memperoleh proses pendidikan yang baik. Ini juga (untuk) mendorong prodi-prodi agar meningkatkan kualitasnya.

Dari segi infrastruktur, apa tantangan agar prioritas di bidang sains dan IT bisa tercapai?

Ini sebenarnya *challenge* bagi kita. Memang potretnya sebagian besar yang memiliki jurusan STEM adalah Perguruan Tinggi Negeri. Namun, sudah lama pemerintah tidak terlalu banyak *invest* untuk peralatan. Oleh karena itu, strategi kita ingin perguruan tinggi dapat meningkatkan kapasitas serta kuota penerimaannya juga ditambah. Jika beasiswanya naik, maka artinya perguruan tinggi juga harus diberi investasi untuk memperbaharui alat laboratorium yang sudah tua dan sekaligus kapasitasnya juga harus ditambah. Kita sedang dalam tahap mengajukan (anggaran) dan kemarin kita sempat berdiskusi dengan Direktur Jenderal Anggaran.

Kira-kira arah *grand design* pendidikan akan seperti apa?

Arah kita yaitu peningkatan (meliputi) akses, kualitas, dan relevansi. Kita ingin men-*drive* yang utama adalah mutu. Kita banyak sekali meluluskan mahasiswa tetapi kemudian jika mutunya kurang akan

membebani. Pendidikan adalah investasi. Oleh karena itu, mutu menjadi sangat penting. Kita mempunyai berbagai program untuk meningkatkan mutu. Misalnya, perguruan yang memang kecil, kita dorong untuk mengejar pendidikan tinggi yang lebih besar, lebih kuat sehingga bisa menyelenggarakan program pendidikan yang lebih bermutu. Kemudian, kita meyakinkan semua program studi terakreditasi serta kualitas proses penyelenggaraan pembelajarannya bermutu.

Bagaimana upaya Kemenristekdikti agar program pendidikan tinggi tetap relevan dengan perkembangan zaman?

Kita semakin mendorong perguruan tinggi agar memiliki beberapa kebijakan. Sebagai contoh, prodi tidak harus menyelenggarakan seluruh mata kuliahnya sendiri. Prodi bisa “mengakui” kredit-kredit yang telah mahasiswa buktikan. “Oh, saya sudah bisa ini, atau mahasiswa mengikuti kuliah *online* yang kualitasnya dijamin lalu hasilnya memang bisa diuji, di-*assessed*, kemampuannya cocok dengan *learning outcome*. Kita sudah ada aturan dimana perguruan tinggi atau prodi diperbolehkan 40 persen dari mata kuliahnya *shopping*. Jadi bisa saja, prodi hanya menyediakan kuliah 60 persen, sementara 40 persennya bisa mengambil kemana-mana. Mahasiswa sudah diberi kebebasan seperti itu sepanjang berpatokan pada *learning outcome*. Kemudian, prodi sendiri juga harus bertanggung jawab pada kualitas kelulusan, karena kualitas kelulusan menjadi *trademark* dari perguruan tinggi atau prodi tersebut.

Yang kedua, khusus untuk politeknik, kita mendorong politeknik-politeknik untuk memiliki program D4 karena lulusannya adalah sarjana terapan, sehingga ada gelarnya. Kita yakinkan perguruan tinggi politeknik *learning outcome*-nya jelas lalu *job* di industrinya harus ada.

Kita juga membuat kebijakan tidak harus (ditempuh) selama 4 tahun sekaligus. Sekarang *skill* pengetahuan cepat sekali usang, kan? Sehingga tidak harus sekaligus 4 tahun. Bisa 2 tahun, kemudian kerja dulu di luar, nanti masuk lagi di tahun ketiga. Di dunia kerja, mungkin banyak pengalaman yang kreditnya juga bisa diakui. Sekarang pilotnya di politeknik, tetapi nanti bisa saja kita *up* sistem yang seperti ini diberlakukan untuk semua. Istilahnya *degree-degree* kecil, *micro credential*. Jadi ke depan akan seperti itu dan kita mulai dari politeknik.

Apa pesan Presiden RI untuk menyiapkan Indonesia Emas di 2045?

Secara khusus, Presiden Jokowi berpesan agar bagaimana prodi-prodi kita semakin relevan dengan kebutuhan kekinian. Jadi esensi dari pesan Presiden adalah tentu bidang-bidang baru harus disegerakan. Perguruan tinggi kita agar menyediakan sumber daya manusia di bidang-bidang baru seperti *big data, data science, artificial intellegence*. Termasuk juga bidang-bidang lama seperti ekonomi harus reorientasi, misalnya akutansi sekarang sudah serba digital, misalnya keuangan sekarang *financial technology*. Pertanian sudah tidak zamannya lagi pertanian memakai cangkul, traktor, mungkin sudah *agriculture four point zero* dan seterusnya.

Yang kedua, proporsi antara mahasiswa yang di vokasi belajar *skill* dengan akademis harusnya lebih banyak yang vokasi. Sebetulnya di pendidikan menengah kita sudah lakukan, tetapi di pendidikan tinggi, kita belum. Jadi sekarang mahasiswa yang di vokasi/politeknik baru 15 persen. Kita ingin tingkatan itu. Tetapi hitungan investasinya cukup besar sehingga dengan anggaran yang ada, kita upayakan seoptimal mungkin. Politeknik-politeknik yang ada kita minta untuk meningkatkan diri tetapi kita tidak bisa melompat jauh. Kebijakan yang terbaru dari Presiden adalah *tax deduction* untuk industri yang membantu politeknik dan riset. Dengan kebijakan keuangan itu, harapannya kita bisa dorong industri untuk *invest* lebih banyak lagi ke vokasi.

Teks Yani Kurnia Astuti

Triva

Tahukah kamu?



Kabinet Ampera I adalah Kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet Ampera terdiri dari lima bidang, yaitu Pertahanan dan Keamanan; Politik; Kesejahteraan Rakyat; Ekonomi dan Keuangan, serta Industri dan Pembangunan. Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan saat itu diemban Sri Sultan Hamengkubuwono IX.



Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968-1973. Kabinet ini terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Menteri Keuangan yang ditunjuk saat itu adalah Menteri Keuangan Prof Dr. Ali Wardhana



Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B. J. Habibie. Kabinet ini dibentuk pada 23 Mei 1998 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Menteri Keuangan yang ditunjuk saat itu adalah Bambang Subianto.

Foto Perpusnas



Menggali Potensi Panas Bumi

Lokasi panas bumi di Dieng

Foto Cahyo Afif

Tak diragukan betapa melimpahnya kekayaan alam negeri ini. Minyak dan gas, batu bara, uranium, air, dan gelombang laut, adalah sebagian kekayaan alam yang bisa dikonversi menjadi sumber energi bagi masyarakat Indonesia. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Indonesia juga punya potensi energi panas bumi sangat besar, bahkan tercatat terbesar di dunia.

Seperti apa potensi energi panas bumi di Indonesia?

Negeri kita dikenal dengan adanya *Ring of Fire* atau jalur gunung api. Potensi energi panas bumi terletak di sana, di gunung berapi yang sudah mati atau tidak aktif lagi. Potensi energi tersebut di Indonesia terhitung besar, ekuivalennya sekitar 40 persen dari cadangan yang ada di dunia. Dalam satuan listrik, seluruh potensinya sekitar 25,4 Gwe (*Gigawatt electrical*), terdiri atas sumber daya sebesar 10,2 GWe, cadangan terduga 12,1 Gwe, dan cadangan terbukti sebesar 3,1 GWe. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia.

Potensi tersebut tersebar sepanjang jalur gunung api mulai dari ujung utara Sumatera (Aceh) menerus ke sepanjang pantai Barat Sumatera, Jawa Bagian Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Potensi panas bumi juga dijumpai di sepanjang selatan-utara Pulau Halmahera.

Bagaimana pemanfaatannya saat ini?

Pengembangan panas bumi di Indonesia telah dimulai sejak kolonialisme Belanda, tetapi pemanfatannya secara intensif dilakukan pada awal tahun 1980-an. Kala itu lapangan panas bumi Kamojang mulai dieksplorasi hingga berproduksi. Indonesia hingga kini telah memanfaatkan panas bumi untuk listrik sebesar 3.012,5 MWe atau sekitar 7 persen dari potensi yang ada dan menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 2 terbesar di dunia dalam pemanfaatan panas bumi setelah Amerika Serikat.

Pemanfaatan potensi panas bumi tergantung pada tiga bulatan faktor. Pertama, penguasaan teknologi. Kedua, pendanaan. Ketiga, regulasi atau kebijakan. Ketiga bulatan faktor ini seharusnya beririsan. Sinergi yang tepat di antara ketiganya dapat menggerakkan

ekonomi. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang kita miliki. Misalnya, hingga saat ini kita belum bisa membuat turbin. Artinya, kita belum menguasai teknologi. Kemudian, kita juga tidak bisa mengendalikan bisnis dari pengeboran. Bisnis tersebut menggunakan harga pasar yang didominasi oleh negara-negara luar, khususnya Amerika Serikat.

Terkait pendanaan, saat ini saya kira banyak kemajuan. Sudah ada dukungan pendanaan dari beberapa *special mission vehicle* pemerintah, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang turut membantu pendanaan. Ditambah lagi dunia ini sekarang *concern* ke rumah kaca sehingga kami pun mendapat dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB). Sementara untuk regulasi, guna mendukung fokus kita dalam pengembangan menjadi *center of excellence*, rasanya dukungan regulasi perlu diperkuat.

Apa saja proyek penyediaan listrik tenaga panas bumi yang dikelola PT GDE?

Pada saat ini kami mengelola empat Wilayah Kerja Panas bumi (WKP), yaitu WKP dataran tinggi Dieng, WKP Patuha, WKP Umbul Telomoyo, dan WKP Arjuno Welirang. Nama Geo Dipa ini sendiri diawali dari gabungan kata *geothermal*, Dieng, dan Patuha. Hal ini lantaran, pada awal pendiriannya memang ditujukan untuk mengelola lapangan panas bumi Dieng dan Patuha. Kemudian, sekitar tahun 2016-2017, kami diberikan hak pengelolaan dua WKP, yakni Umbul Telomoyo di Semarang dan Arjuna Welirang di Jawa Timur.

Untuk area pengelolaan ke depannya, kami menunggu penugasan. Terus terang, banyak sekali pemberian penugasan. Kami sendiri tidak terlalu agresif. Mengapa? Di area pengelolaan yang ada masih banyak potensi yang perlu dikerjakan. Di Patuha terdapat cadangan atau ekuivalen sampai



Riki Ibrahim,
Direktur Utama
PT Geo Dipa
Energi

Foto
Resha Aditya

kelas dunia. Pada prinsipnya adalah bagaimana cara membangun kultur seperti perusahaan kelas dunia. Ini butuh waktu. Selain itu, kita perlu menguasai teknologi dengan benar. Pemanfaatan teknologi ini juga terkait dengan upaya menekan biaya eksplorasi.

Secara teknis, tantangan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia antara lain faktor lokasi yang banyak dijumpai pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, juga efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik, dan cadangan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Bagaimana rencana dan harapan PT GDE ke depan?

Komitmen Indonesia untuk perubahan iklim tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations*. Dalam mendukung program tersebut, kami mendukung upaya pengurangan emisi karbon CO2 minimal sebesar 1,7 juta ton per tahun di tahun 2023 dan 6 juta ton per tahun di tahun 2035. Komitmen ini tercermin dalam rencana jangka pendek dan panjang pengembangan usaha PT GDE.

Kami sangat mengharapkan dukungan dari negara berupa penguatan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan panas bumi. Terutama, berupa regulasi untuk membangun *center of excellence*. Bentuknya bukan hanya bagaimana membangun perusahaan di sini, tetapi juga membangun SDM internal. Sebagai contoh, pembentukan SMK-SMK panas bumi. Tenaga pengajar sudah ada, tempat belajar juga sudah ada. Ini perlu didorong oleh pemerintah melalui regulasi yang tepat.

Teks Reni Saptati D.I

dengan 220 Mwe. Yang sudah pasti ada sejumlah itu, sedangkan yang belum pasti masih ada sekitar 200 Mwe. Belum lagi Dieng, yang luasnya saja mencapai 110 ribu hektar.

Bagaimana pendanaan untuk proyek-proyek tersebut?

Dalam hal pembiayaan pengembangan panas bumi, saat ini dunia sangat mendorong pendanaan proyek energi terbarukan. Untuk mengembangkan lapangan Dieng dan Patuha, kami akan mendapat dukungan pendanaan dari ADB sebesar 300 juta USD untuk tahap pertama dan rencananya sebesar 300 juta USD lagi untuk tahap kedua. World Development Bank juga menawarkan pendanaan kepada kami untuk pengembangan WKP Arjuno Welirang. Untuk itu, apabila harga jual listrik sudah sesuai dengan keekonomian proyek, pembiayaan pengembangan proyek PT GDE tidak akan ada masalah.

Bagaimana cara PT GDE untuk membantu pengembangan energi listrik untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil?

Skala pembangkit listrik panas bumi bisa dari skala kecil hingga skala besar, atau sekitar 5-110 MWe per unit. Dengan demikian, pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik sangat fleksibel dan tepat untuk sistem kelistrikan yang mengharuskan penggunaan sistem *isolated* seperti pulau-pulau terpencil di kawasan Indonesia Timur, sampai dengan sistem besar yang terinterkoneksi seperti Jawa-Bali.

Saat ini, kami bekerja sama dengan PT SMI merintis pengembangan listrik di daerah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia Timur dengan memanfaatkan program *Government Drilling*. Salah satu lokasinya di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur.

Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan proyek penyediaan listrik tenaga panas bumi?

Kami menemukan banyak tantangan agar PT GDE bisa menjadi perusahaan

BUTUH DATA PNBP?



SINGLE SOURCE DATABASE
PNBP

ssdpnbp.kemenkeu.go.id

Contact Us : (021) 3868085

Kesederhanaan Sang Inspektur

ROBERT GONIJAYA
Inspektur VII, Inspektorat Jenderal

Foto
Andi Alhakim

Pemuda dari Ambon itu nekat bertolak ke Jawa saat musim liburan sekolah tiba. Kantong cekak tak menjadi penghalang baginya. Ia menumpang kapal TNI Angkatan Laut, meski itu harus memundurkan keberangkatannya, menyesuaikan jadwal kapal. Tujuh hari lamanya pemuda bernama Robert Gonijaya itu berlayar menuju Surabaya. Setelah menginap semalam di Kota Pahlawan, ia akhirnya sampai di Jakarta keesokan harinya. Sesampainya di Ibu Kota, seorang kawan mengajak ke Padang. Ia pun mengiyakan ajakan temannya tersebut.

Setelah dari Tanah Minang, mereka kembali ke Jakarta, masa liburan pun hampir habis. Robert muda merasa belum sempat melihat Jakarta. Ia mengumpulkan keberanian untuk menelpon orang tua nun jauh di Ambon. “Pak, bisa *enggak ngurus* surat pindah, saya pindahnya ke Jakarta,” tanya pemuda itu. Di ujung telpon Yusuf Yohannes, Sang Bapak, memberi restu. Untung saja di sini ia punya paman yang membantu proses kepindahan. Dari SMA 1 Ambon, Robert melanjutkan pendidikan tahun keduanya ke SMA 37 Jakarta. Di situ ia masuk kelas ilmu pengetahuan alam dan menggantungkan cita-citanya menjadi seorang *engineer*.

Rupanya mimpi dan usahanya tidak sia-sia. Ia diterima di jurusan teknik elektro di kampus teknik terbaik negeri ini, Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada saat yang sama, Robert juga diterima di jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia gamang di antara dua pilihan. Tentu ia ingin memilih jurusan sesuai jenjang pendidikan yang diambil. Tapi tawaran dari sekolah kedinasan menggiurkannya karena akan meringankan beban keluarganya.

Ia teringat bapaknya yang bekerja ikut orang dan harus menghidupi keluarganya, adik-adik Robert masih ada empat. “Walaupun saya sekolahnya itu di

perguruan tinggi negeri, kali aja kan ada masalah akhirnya nanti bagaimana adik-adik saya nanti kuliahnya?”, pikir pemuda itu. “Saya putuskan udahlah saya masuk STAN saja!” lanjutnya.

Terus Giatkan Perbaikan

Selepas lulus dari STAN tahun 1989, Robert ditempatkan di Inspektorat Perlengkapan. Di sana ia diperbantukan ke Tim Gabungan Wajib Pajak (WP) Potensial. Setelah satu tahun setengah, ia dikembalikan ke unit tempatnya mengabdikan semula. Di sana ia mulai diberi kepercayaan untuk mengaudit. Pengalaman pertamanya adalah mengaudit di Majelis Pertimbangan Pajak (cikal bakal Sekretariat Pengadilan Pajak).

Di tahun 1995 setelah lulus dari Diploma IV, ia ditempatkan di Inspektorat Pajak. Saat itu ia juga diperbantukan ke Inspektorat Umum menangani Rekening Dana Investasi (RDA) dan *Soft Loan Agreement* (SLA). Berikutnya, ia juga dipercaya memeriksa beberapa kantor pajak. “Mungkin lima kantor pajak setelah itu siap pendidikan lagi persiapan keluar negeri jadi masuk 1998, 1999 saya berangkat, tahun 2000 saya selesai,” kenangnya.

Gelar Master of Science in Finance dikantonginya dari University of Illinois at Urbana Champaign Amerika Serikat. Bisa dibilang Robert adalah sosok yang selalu ingin menjadi versi dirinya yang lebih baik. Mengejar pendidikan menjadi sarana baginya untuk menambah pengetahuan baru yang akan diimplementasikan ke pekerjaannya. Usai meraih gelar master, ia kembali ke Inspektorat Jenderal. “Saya tuh tidak ke mana-mana, di Itjen terus,” kelakarnya.

Semangat perbaikan itu ia bawa di tempatnya bekerja. Di kala itu sedang terjadi restrukturisasi organisasi. Unit Eselon IV di bidang Pemeriksa berubah menjadi organisasi fungsional. Ia kemudian

diberi kepercayaan untuk masuk ke dalam tim persiapan yang menyusun pedoman organisasi fungsional baru tersebut. Atas kontribusinya tersebut, ia mendapat amanah untuk mengampu jabatan Kepala Subbagian Penatausahaan Jabatan Fungsional. Karirnya terus meningkat, khususnya di bidang penataan organisasi dan pengawasan kinerja, hingga akhirnya sejak Januari 2014 ia menjabat sebagai Inspektur VII pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Di unit Eselon II yang ia pimpin sejak lima tahun lalu ini ia pun mengawal semangat perubahan. Saat itu, ia menganggap perlunya sebuah unit yang melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang) internal. “Puluhan tahun kita yang jalanin litbang ya gitu-gitu saja,” ucapnya, “Nah, harus ada orang yang bisa mengembalikan agar *internal out* berjalan dengan baik!” sambungnya.

Setelah restrukturisasi organisasi yang dikawalinya, fungsi Inspektorat VII berubah wajah. Kini unit tersebut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengawasan *intern*. Agar berjalan sesuai maruahnyanya, tugas mereka mencakup proses penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan. Selain itu, unit ini juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari hasil pengawasan tersebut, disusun laporan hasil pengawasan sebagai bekal perbaikan ke depan.

Kekuatan sebuah pikiran

Mengenang ke belakang, Robert mengaku dirinya dulu adalah sosok pesimis dan pemalu. Namun itu semua perlahan mulai terkikis semenjak membaca sebuah buku karya Norman Vincent Peale yang berjudul *The Power of Positive Thinking*.



Robert bersama keluarga

Foto
Dok. Pribadi

Buku yang tak sengaja ia temukan di rumah teman tempatnya bermain sepulang sekolah itu mulai membuka optimisme pada diri Robert muda. “Hati kecil saya tetap ada ragu, tapi setelah baca itu jadi ada penyeimbangannya. Kan belum tentu senegatif itu hasilnya,” ucapnya.

Buku lain yang mengubah cara pandang Robert dalam kehidupan adalah 7 *Habits of Highly Effective People*. Ia mencoba menerapkan teori itu ke dalam kehidupannya, dan dirasa sangat sesuai dan *applicable*. Robert juga menerapkan tujuh kebiasaan tersebut dalam memimpin organisasinya. Dari buku ciptaan Steven R Covey itu, ia menerapkan semangat untuk terus proaktif namun harus selalu berorientasi pada hasil akhir, sehingga bisa lebih bertanggung jawab pada keputusan yang diambil. Hal lain yang ia ambil dari buku itu adalah cara membuat prioritas, menjadi lebih simpati, bersinergi, dan selalu tumbuh dengan terus mengasah kemampuan.

Robert merasa kebiasaannya membaca ditularkan oleh ibunya, Fani Tanalia. Perempuan yang sempat berprofesi sebagai guru ini masih gemar membaca hingga usia senja. Sebuah teladan yang ia kagumi dari sosok sang mama yang kini telah menginjak usia ke-75 tahun. Selain kebiasaan baik tersebut, sosok sang mama juga menitipkan

lima nilai kehidupan. Nilai yang paling penting adalah untuk tidak tamak. “*Nggak lojo*, itu Bahasa Ambon, artinya jangan rakus. ‘*udah lah kalau bukan punyamu ikhlaskan, nggak papa*’ begitu pesan Mama,” ucap Robert, “Tidak perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan kamu.”

Tanamkan iman dan keharmonisan

Meski disibukkan dengan tuntutan pekerjaan di kantor, Bapak empat anak ini tak pernah mengesampingkan keluarga. Baginya keluarga tetap utama. Meski tak bisa selalu bersama, tapi harus saling ada satu sama lain. Teknologi memang sangat membantu keluarga di zaman ini untuk tetap selalu terhubung. Namun, keberadaan fisik memang selalu harus diperjuangkan. Robert tidak segan mengantar dua buah hatinya yang masih bersekolah ke tempat les di akhir pekan. Ia juga senang ketika diminta anak-anaknya untuk mengantar ke kolam renang atau sekedar jalan-jalan santai menghabiskan waktu santai.

Sementara itu, dua anak tertua Robert telah menempuh pendidikan tinggi. Satu orang baru saja wisuda, sedangkan lainnya berkuliah di Surabaya. Sebagai umat Kristiani, sejak dulu ia dan keluarganya bangun pagi dan seringkali mengawali hari dengan melaksanakan ‘saat teduh’, membaca alkitab dan berdoa.

Setelah dua anaknya pergi merantau untuk kuliah, kebiasaan tersebut tetap dilanjutkan Robert dengan istrinya. “Anak-anak yang kecil agak susah bangun pagi, ya tidak mungkin saya paksa. Tapi mereka menggantinya dengan doa malam, saat teduh tetap kami kerjakan sekeluarga pada *weekend*,” ungkapnya.

Kepada keluarganya, ia tak henti mengingatkan satu hal. Ia selalu menekankan untuk hidup sederhana. Boleh jadi nilai tersebut adalah bentuk warisan dari nilai yang diajarkan ibunya, untuk tidak rakus. Seadanya saja, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. “Meskipun anak saya satu ada yang selalu bilang *pengen* jadi orang kaya, ya boleh aja asal *halal*,” serunya sambil terkekeh.

Kepada timnya di kantor yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, ia juga membagikan hal yang sama. Robert merasa apa yang bisa ia berikan tidaklah banyak. Ia hanya ingin menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Terlebih di tempatannya memimpin banyak diisi pegawai dengan latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi. “Mereka ini orang-orang hebat, sertifikasinya banyak, bisa keluar dan kerja dimana-mana,” pujiannya.

Untuk itu Robert selalu berusaha memahami kebutuhan tiap pegawainya. Ia menerapkan sistem *management by walking around*. Tiap waktu, ia tak sungkan mendatangi meja-meja pegawainya. Dari situ terjadi percakapan ringan, yang justru memudahkan baginya untuk mengetahui permasalahan yang ada, sekaligus menularkan semangat perbaikan.

“Dari hubungan yang saya bina dengan tim, saya jadi tahu apa yang mereka butuhkan, bagaimana saya bisa memenuhinya sehingga lingkungan kerja kondusif. Dengan keterbukaan itu, saya juga bisa terus menularkan semangat pencegahan *fraud*, sehingga Kementerian Keuangan sebagai organisasi bisa tumbuh lebih baik lagi,” pungkasnya.

Teks Dimach Putra

Opini

Mewaspadaai Potensi Disrupsi Libra pada Sistem Keuangan

Apri Sya'bani,
Analisis Pusat Kebijakan Sektor
Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan

Facebook mengumumkan akan menerbitkan koin digital Libra pada tahun 2020. Libra akan menjadi token digital yang dapat digunakan sebagai media transfer dan alat pembayaran transaksi belanja pada *merchant* rekanan Facebook. Namun rencana peluncuran Libra terancam mundur karena kekhawatiran dari banyak pemerintah negara-negara G-20, terutama terkait pengaruhnya terhadap aktivitas pencucian uang, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Bagaimana respons kebijakan yang perlu disiapkan regulator dalam menghadapi rencana peluncuran Libra?

Libra Berpotensi Lebih Ekspansif dari Crypto-asset

Sebagai pengembangan *crypto-asset* (istilah lain *crypto-currency*), Libra mempunyai persamaan ciri pada pemanfaatan teknologi *Distributed Ledger Technology* (DLT). Libra juga sering disebut sebagai *stablecoin*, karena mempunyai *underlying asset* berupa *currency* dan aset lain yang menjamin nilai intrinsiknya sehingga menjadikan nilainya lebih stabil. Namun, berbeda dengan Bitcoin dan *crypto-asset* lainnya yang menggunakan validasi *permissionless blockchain*, saat ini Libra lebih memilih validasi *node* yang

tersentralisasi oleh protokol konsensus (*permissioned blockchain*) melalui otorisasi Libra Association. Hal ini memungkinkan Libra mempercepat validasi transaksi dan menghemat konsumsi energi.

Libra Association didukung oleh jaringan layanan digital besar diantaranya Vodavone Group, Uber, eBay, dan Facebook. Akibatnya, Libra menjadi lebih atraktif digunakan sebagai instrumen pembayaran, media transfer, dan penempatan aset (investasi). Melalui keunggulan teknologi, manfaat penggunaan, dan luasnya jaringan, penetrasi Libra diprediksi jauh lebih luas dibandingkan *crypto-asset*, serta secara cepat berpotensi menjadi *systemic importance*, baik pada lingkup yurisdiksi negara maupun skala global.

Potensi Risiko Libra terhadap Sistem Keuangan

Respons kebijakan terhadap *crypto-asset* pada tiap negara bisa bervariasi akibat persoalan di sekitar parameter regulasi dalam memasukan karakteristik *crypto-asset* sebagai aktivitas dan/atau produk



Ilustrasi
Dimach Putra

Selain itu, distribusi dan aplikasi penggunaan Libra hampir sama dengan mata uang virtual lainnya. Telah diketahui bersama, tren penggunaan mata uang virtual semakin lazim digunakan dalam transaksi sehari-hari.

jasa keuangan. Jika demikian, asimetri peraturan pada Libra mungkin terjadi karena kompleksitas dan berbaurnya kegiatan dan produk dalam satu entitas. Pemerintah di US masih menjajaki apakah Libra harus mendapat lisensi sebagai bank. Sementara untuk aktivitasnya, dipertimbangkan agar tunduk pada rezim regulasi pasar modal (*securities regulation*). Pada kasus lain, Libra Association yang berbasis di Switzerland sedang menjajaki kemungkinan tunduknya aktivitas Libra pada otoritas Swiss *Financial Markets Supervisory Authority*.

Pertanyaan berikutnya, apakah otoritas masing-masing yurisdiksi kelak dapat menahan laju penetrasi Libra via Facebook? Di Indonesia, UU tentang Mata Uang melarang mata uang selain Rupiah, termasuk Libra, digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Namun demikian, dari sisi penawaran dan permintaan akan sulit menahan peredaran Libra, khususnya dilihat dari kebutuhan konsumen akan alternatif pembayaran yang lebih efisien. Selain itu, distribusi dan aplikasi penggunaan Libra hampir sama dengan mata uang virtual lainnya. Telah diketahui bersama, tren penggunaan mata uang virtual semakin lazim digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sebagai contoh, penggunaan bonus poin digital yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan barang atau layanan jasa.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia (yang menduduki peringkat ketiga pengguna terbesar Facebook, data per Juli 2019) perlu memitigasi dan mempersiapkan kerangka regulasi yang mungkin berlaku terhadap Libra. Melalui tujuan inklusi yang diusung Libra, negara berkembang lebih berpotensi menjadi target pemasaran.

Itu sebabnya, mitigasi perlu dilakukan. Khususnya, pada kerangka peraturan yang berpeluang berlaku terhadap pengelolaan *underlying asset* Libra yang terdiri dari penggabungan beberapa produk keuangan, seperti deposito, *government bond* tenor pendek, dan beberapa mata uang yang cukup stabil. Tidak prudennya pengelolaan kelak berpotensi mempengaruhi kestabilan ekosistem Libra, merusak kepercayaan konsumen maupun sistem keuangan.

White Paper Libra menjelaskan *underlying asset* Libra akan terdiri dari beberapa mata uang lokal, sehingga nilainya akan ditentukan oleh *exchange rate*. Konsumen dapat dengan mudah mengonversi mata uangnya ke Libra yang dianggap lebih stabil. Akibatnya, Libra berpotensi mempengaruhi kestabilan mata uang, khususnya pada negara berkembang yang nilai tukarnya cenderung rentan.

Risiko lainnya adalah *interconnectedness* di dalam sistem keuangan yang mungkin timbul melalui peran lembaga keuangan sebagai kustodian, *re-sellers* dan *market-makers* serta peran lembaga nonkeuangan melalui *channel* aktivitas Libra pada sektor retail. Jika transaksi tersebut sudah cukup besar, potensi *exposure* kepada lembaga keuangan melalui kepemilikan langsung

dapat mengekspos lembaga keuangan diantaranya terhadap risiko pasar dan likuiditas. Risiko ini menjadi sistemik jika institusi saling terkoneksi dan kepemilikannya tersebar luas pada sistem keuangan.

Stablecoin juga berpotensi menimbulkan risiko pada perlindungan konsumen dan kegiatan pencucian uang untuk kegiatan ilegal dan pembiayaan terorisme. Disamping keunggulan dalam mengurangi biaya remitansi, risiko pemanfaatan Libra untuk pencucian uang perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini mengingat skala dan kemudahan penggunaan Libra sebagai media pengiriman uang untuk masyarakat yang masih *unbankable* dijanjikan secepat pengiriman pesan via *messenger* melalui dompet digital Calibra.

Koordinasi Lintas Otoritas

Karakteristik lintas batas, aset, dan sektor pada aktivitas Libra merupakan tantangan yang perlu diantisipasi oleh lintas otoritas, baik dalam tataran individu yurisdiksi maupun internasional. Secara global, forum kerjasama antarnegara perlu melakukan pendekatan *forward-looking* dalam memonitor dan memitigasi guna mempersiapkan respons kebijakan komprehensif dalam meminimalkan dampak Libra terhadap stabilitas sistem keuangan. Inisiasi ini perlu

dilakukan khususnya oleh negara-negara berkembang yang berpotensi terdampak lebih besar akibat penggunaan Libra.

Mitigasi regulasi yang mungkin berlaku di Indonesia terkait kegiatan Libra, semakin menguatkan alasan perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan yang sudah *out of date*.

Sebut saja, undang-undang (UU) terkait pasar, serta UU terkait perbankan yang masih kental berfokus pada konsep *institutional based regulation*. Kedua UU tersebut diketahui belum mengakomodasi perkembangan industri. Sementara di sisi lain, pesatnya inovasi bisnis dan teknologi mengakibatkan batas-batas kegiatan bisnis pada suatu entitas dan produk semakin membur.

Meskipun disadari bahwa otoritas terkait telah menerbitkan aturan-aturan teknis yang berusaha mengakomodasi perkembangan industri, akan tetapi payung hukum yang menaungi kegiatan bisnis industri keuangan perlu dituangkan pada tataran peraturan perundang-undangan sehingga pelaku pasar dan otoritas pengawas mempunyai landasan yang kuat dalam sinergi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam lingkup yang lebih besar, pembaharuan regulasi sektor keuangan diperlukan bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan sektor keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan kerangka pengaturannya cukup mengakomodir penguatan sistem keuangan dan pengembangan industri, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi secara efektif bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. Dari sisi pengawasan, respon kebijakan atas Libra dan *stablecoin* lainnya berpotensi dilakukan oleh lintas lembaga. Seperti

Bank Indonesia untuk aspek sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan jika Libra digunakan oleh lembaga keuangan serta apabila pengelolaan komponen cadangan asetnya sesuai dengan karakteristik pengelolaan investasi di pasar modal, BAPPEBTI jika Libra sebagai produk dikategorikan sebagai komoditas sebagaimana *crypto-asset*, dan Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan untuk menangkap potensi pajak dari aktivitas transaksi yang dilakukan menggunakan Libra. PPATK juga perlu memonitor dan bekerjasama dengan otoritas pengawas Libra untuk memastikan diberlakukannya standar *anti money laundering/countering the financing of terrorism*.

Terlepas tertundanya peluncuran Libra, akan ada pengembangan *stablecoin* lain yang mau tidak mau mendisrupsi sistem keuangan. Tersekatnya pola pengawasan dan pengaturan tiap produk dan sektor menjadi tantangan dalam merespon perkembangan *stablecoin*. Untuk itu, masing-masing otoritas terkait perlu melakukan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan mempersiapkan regulasi teknis yang akan mengakomodir inovasi bisnis serta mendorong pembaharuan perundang-undangan di sektor keuangan yang secara komprehensif dapat memayungi aktivitas, layanan, dan produk lintas batas sehingga dapat dijadikan pijakan untuk bersama-sama merespon dan mengambil peran dalam mencegah disrupsi teknologi yang berpotensi mempengaruhi kestabilan sistem keuangan.

Ilustrasi Dimach Putra



Peran Teknologi dalam Bidang Hukum

Bakhtiar Amaluddin,
Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan

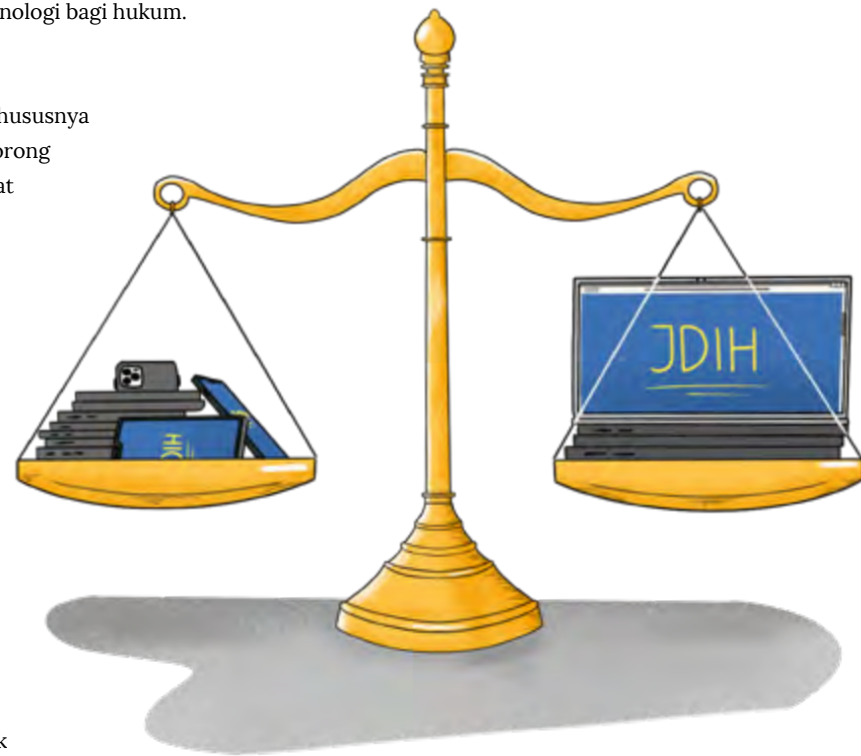
Teknologi dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yakni “hukum untuk teknologi” dan “teknologi untuk hukum”. Hukum untuk teknologi berkaitan dengan bagaimana peranan hukum dalam memandang fenomena-fenomena yang terjadi sebagai akibat perkembangan teknologi. Dalam pembahasan ini, saya akan memfokuskan pada sisi yang kedua, yakni teknologi untuk hukum. Konkretnya adalah, bagaimanakah peran teknologi bagi hukum.

Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi telah mendorong perubahan zaman menjadi sangat pesat. Hadirnya berbagai teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 seperti Artificial Intelligence (AI), Blockchain, dan Internet of Things (IoT) mengubah berbagai bentuk pekerjaan manusia menjadi proses otomatisasi. Tugas-tugas yang dahulu dikerjakan secara manual, telah digantikan oleh mesin dan komputer yang dapat melakukan pekerjaan menjadi lebih efisien. Teknologi juga membawa perubahan yang signifikan di berbagai bidang, tak

terkecuali di bidang hukum.

Pada hakikatnya, penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan upaya mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah mengenai kemampuan mengendalikan api telah meningkatkan ketersediaan



Ilustrasi
Dito Novenska

sumber-sumber pangan. Demikian halnya penemuan alat bernama roda juga telah membantu manusia dalam melakukan perpindahan atau bepergian serta mengendalikan lingkungan mereka.

Di bidang hukum, sejarah mencatat bahwa awal mula berkembangnya teknologi di bidang hukum juga tidak terlepas dari bagaimana upaya manusia mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 1785 SM masyarakat Babilonia yang mendiami lembah Mesopotamia mencoba mengkodifikasikan 285 undang-undang di atas sebuah batu yang dikenal sebagai Code of Hammurabi.

Teknologi menulis saat itu masih sangat sederhana. Namun, cara manusia tersebut merupakan kisah awal bagaimana rekayasa berpikir manusia dalam mengoptimalkan peran teknologi di sektor hukum.

LegalTech: inovasi teknologi di bidang hukum masa sekarang

Seiring dengan perubahan zaman, perkembangan di bidang hukum yang terjadi juga linier dengan perkembangan teknologi. Namun yang menjadi diskusi menarik berkaitan dengan seberapa responsif teknologi-teknologi baru tersebut diterapkan di bidang hukum.

Barangkali pada masa sekarang kita sering mendengar beberapa istilah seperti *fintech*, *insuretech*, dan *agrotech*. Semua itu merupakan contoh bagaimana teknologi telah mendisrupsi berbagai sektor. Bahkan *fintech* tiada henti-hentinya menjadi materi yang sering dijadikan isu pada berbagai diskursus publik.

Tidak berbeda di sektor keuangan, di sektor hukum kini muncul sebuah *buzzword* baru yakni *legaltech*. Namun demikian, gaung *legaltech* ini tidak sebisng

fintech. Hal ini, disadari atau tidak, akibat dari relatif lambatnya adopsi teknologi-teknologi baru di bidang hukum. Hal ini dikatakan seorang profesor Marti Manent dari IE Law School, Spanyol:

“The disruption that technology is having across all sectors of the economy. And I would say that the legal sector is one of the most resistant to change, is one of the most conservative ones.”

Meskipun lambat, di Indonesia, beberapa perusahaan rintisan di bidang *legaltech* mulai bermunculan membentuk sebuah ekosistem *legaltech* semenjak 2-3 tahun lalu. Sebut saja Justika, Privy, Eclis, dan PopLegal. Beberapa usaha rintisan tersebut hadir untuk menyediakan layanan baru di bidang hukum dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Beberapa *startup*, dengan teknologi yang tersedia, telah membuktikan diri dalam merealisasikan berbagai terobosan baru di bidang hukum seperti otomasi penyusunan dokumen, *digital signature*, kodifikasi hukum, dan *market place* yang mempertemukan praktisi hukum dengan masyarakat.

Peluang di sisi pemerintah

Melihat bagaimana teknologi telah mengambil peran yang istimewa dalam pengembangan bidang hukum, nampaknya hal ini menjadi peluang bagus yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja.

Penerapan terobosan baru seperti Digital Signature yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah salah satu contoh bagaimana teknologi diterapkan di bidang hukum. Ini merupakan bentuk penerapan teknologi kriptografi dalam mengamankan dokumen digital agar tidak mudah dipalsukan.

Tidak perlu jauh-jauh, di Kementerian Keuangan ada contoh nyata. Ialah inovasi yang dilakukan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal. Biro Hukum telah mengembangkan beberapa sistem untuk mendukung layanan hukumnya antara lain Sistem Informasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Simfoni), Aplikasi Smart Legal Drafting (Smart LD), dan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang tersedia dalam dua bentuk yakni website dan aplikasi android.

Itu hanya contoh yang telah direalisasikan. Tentu masih terdapat beberapa peluang pemanfaatan IT yang secara potensial dapat dilakukan pemerintah di bidang hukum. Terlebih ketika menyaksikan pemerintah masih memiliki sederet pekerjaan rumah di bidang hukum. Ini erat kaitannya dengan program reformasi regulasi yang terus berjalan, namun masih kita saksikan banyaknya peraturan yang masih tumpang tindih dan terkesan ruwet.

Faktor penentu keberhasilan dalam memanfaatkan tantangan sekaligus peluang yang ada tersebut tergantung pada pemerintah sendiri. Ini tentang bagaimana pemerintah menangkap dengan baik teknologi yang dipunyai untuk dapat diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah yang berdinamika. Hal yang tidak kalah penting, meskipun teknologi seperti AI dan Blockchain terdengar sangat menawan, tetapi yang perlu diingat adalah kesesuaian teknologi tersebut dengan penerapannya di lapangan. Jangan sampai hanya karena mengikuti tren untuk menyematkan label atau *buzzword* teknologi kekinian yang *sophisticated* namun tidak memiliki signifikansi apapun terhadap kinerja layanan.

Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai Tipe B
Sorong

Langlang Bahari Jaga NKRI

Sorong merupakan gerbang masuk para pendatang ke tanah Papua. Kota pelabuhan ini memang memiliki lokasi yang sangat strategis. Letaknya membentang di bagian dahi kepala pulau yang bentuknya sering disebut menyerupai burung cendrawasih ini. Karena alasan tersebut, kota ini dijadikan lokasi pangkalan sarana operasi bea dan cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit eselon satu di Kementerian Keuangan yang memiliki beberapa tugas dan fungsi strategis. Untuk menjalankan amanah tersebut, DJBC memiliki beberapa jenis kantor yang dibentuk sesuai dengan peruntukannya. Salah satu tugas yang harus dijalankan adalah pelaksanaan patroli laut dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJBC membangun beberapa Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC).

Hingga 2014, Bea Cukai hanya memiliki empat buah PSO BC yang tersebar di beberapa titik. Wilayah perairan sekitar semenanjung Malaysia dan Singapura berada dalam pengawasan PSO BC Tanjung Balai Karimun dan Batam. Untuk Jakarta hingga Kepulauan Nusa Tenggara, tugas tersebut dijalankan oleh PSO BC Tanjung Priok. Di tengah hingga timur sisi utara Indonesia, amanah tersebut dipercayakan kepada PSO BC Pantoloan. Melihat luasnya wilayah kerja PSO BC Pantoloan, yang meliputi sisi timur Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku hingga Papua, maka dipandang perlu perlu pembagian beban kerja dengan cara membuka sebuah PSO BC yang baru. Diharapkan, kehadiran pangkalan baru ini akan mengoptimalkan pelaksanaan patroli bea dan cukai, terutama di wilayah Maluku dan Papua.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.05/PMK.01/2014, dibentuklah PSO BC Tipe B Sorong pada tahun 2015. Sesuai dengan rencana, pangkalan armada patroli bea cukai ini melayani Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Khusus Papua dan Kanwil DJBC Maluku. Sorong dipilih karena lokasinya dinilai paling startegis dalam menjangkau wilayah jelajah dua Kanwil tersebut. Untuk menunjang tugasnya, PSO BC Sorong dilengkapi kekuatan dua buah kapal patroli. Kapal Patroli BC 3007 dan 9001. PSO BC kelima dan termuda ini kini dipimpin oleh Kholis Kamaludin yang membawahi 77 orang pegawai.

Lebih dari patroli

Tugas sebuah pangkalan sarana operasi tak hanya melakukan patroli saja, tapi juga keseluruhan dari proses sebelum hingga setelah patroli. Kegiatannya meliputi *maintenance* kapal, perencanaan rencana strategis, dan penyediaan anak buah kapal. "Seluruh kebutuhan patroli kami sediakan, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan" jelas Hari Susanto, Kepala Seksi Nautika, sebagai salah satu perwakilan Kepala Pangkalan yang berhalangan menemui kami karena sedang bertugas.

Ditanya tentang tantangan khas yang harus dihadapi, para penjaga perairan nasional ini menjawab faktor alam. Bentang alam Kepulauan Maluku dan Papua dikelilingi oleh Samudera Pasifik. Samudera terluas di dunia ini terkenal dengan palung dalam, dasar lautnya terdiri dari banyak patahan lempeng bumi aktif dan pusat badai tropis. Gelombang tinggi merupakan makanan sehari-hari para *marine customs officer* ini. "Sebelumnya saya pernah menjadi petugas patroli di perairan barat. Tapi memang tidak seberat di sini" ungkap Hazrizal, Kepala Seksi Teknik dan Pemeliharaan Kapal, yang mendampingi Hari Susanto siang itu.



Gedung PSO BC
Tipe B Sorong

Petugas di atas salah
satu kapal patroli

Suasana di ruang
kemudi kapal patroli

Kholis Kamaludin,
Kepala PSO BC
Sorong

Dari dekat, kapal
patroli PSO Sorong

Foto
Resha Aditya P.

Foto
Dok. PSO BC
Sorong



Dalam pelaksanaan tugas utamanya, ada beberapa jenis patroli yang diselenggarakan PSO BC Sorong. Patroli bisa dilakukan secara mandiri, atau terpadu yang dilaksanakan lintas wilayah kerja Kanwil DJBC. Sementara itu jenis patroli khusus melibatkan kerja sama PSO BC Sorong dengan instansi pemerintahan lain (BNN, TNI/POLRI). Jenis patroli terakhir adalah patroli terkoordinasi, di mana pelaksanaannya melibatkan instansi bea dan cukai negara lain.

Unit patroli PSO BC Sorong juga terlibat dalam beberapa operasi khusus kemanusiaan. Saat kerusakan yang menyebar di Papua beberapa bulan lalu, mereka ditugaskan mengirim

satu kapal ke Jayapura. Sedianya kapal tersebut akan digunakan untuk mengevakuasi pegawai di sana yang kantornya luluh lantak dibakar massa. Untung keadaan telah berangsur kondusif saat mereka sampai di sana. Evakuasi pun urung dilakukan, meninggalkan hanya penyaluran bantuan kebutuhan pokok saja.

"Saat itu memang cukup mencekam, saat mereka patroli berangkat ke Jayapura, kami di sini juga harus bersiap siaga," kenang Hazrizal. "Di seluruh Sorong jalanan dipenuhi massa. Atas arahan atasan, kami semua mengungsi ke kantor, supaya mudah koordinasinya jika kondisi makin parah" lanjutnya. Bagi mereka ini semua adalah risiko pekerjaan yang harus dijalani dengan ikhlas. Mereka pun tetap percaya bahwa badai pasti berlalu karena seluruh warga Papua cinta kedamaian.

Berangan menjadi pangkalan terdepan

Tantangan rupanya tak hanya datang dari kondisi geografis dan sosiologis di sana. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penunjang juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tergarap. Sampai saat ini PSO BC Sorong masih menempati bangunan rumah sewa yang disulap menjadi kantor pangkalan sederhana. Letaknya di tengah komplek perumahan pegawai Pertamina, jauh dari dermaga. "Rasanya memang aneh jika sebuah pangkalan tidak berada di tepi laut, di mana armada kapal patrolinya bersandar," ungkap Hari.

Isu pengadaan bangunan gedung pangkalan memang telah bergulir lama. Hukum adat yang berlaku di sana menjadi sedikit kendala dalam merealisasikan rencana tersebut. Untuk membebaskan sebuah lahan yang akan dibangun, beberapa peraturan adat harus terpenuhi. Langkah yang lebih mudah diambil adalah dengan skema pengalihan aset idle yang telah dimiliki oleh instansi lain. Saat ini PSO BC Sorong sedang melakukan pendekatan ke salah satu BUMN pemilik aset tersebut yang berada di kawasan pelabuhan ikan.

Memiliki pangkalan yang kuat, tak hanya dari sisi fisik bangunan yang representatif, tapi juga kualitas SDM yang dimiliki menjadi harapan segenap jajaran di PSO BC Sorong. Impian tersebut tidak terlalu tinggi jika yang dituju adalah optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Perbaikan dan penyempurnaan bertahap yang terus dilakukan akan semakin menunjukkan kepada instansi lain dan masyarakat. Itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan berbagai pihak dan masyarakat luas dalam pelaksanaan visi misi organisasi tersebut. Sebagai penutup, Hazrizal menyampaikan pesan dari Kepala Pangkalan. "Menjadi kebanggaan kami bisa menjaga perairan perbatasan NKRI. Kami percaya segalanya akan jadi lebih baik lagi, sehingga kami bisa makin bangga menjalankan tugas kami!" tutupnya mengakhiri siang itu.

Teks Dimach Putra

Lelaki Pegunungan dalam Kepung Lautan

*Dimas Nugroho,
Treasury Management
Representative pada KPPN Tual*

Tual, sebuah kota yang lokasinya menyerupai liontin bagi leher Papua. Kota belia ini terletak di pulau Dullah, berdampingan dengan pulau Kei Kecil, Kei Besar, dan Fair. Sebelum tumbuh mandiri sebagai kota, mulanya ia adalah bagian dari kabupaten Maluku Tenggara di provinsi Maluku. Kota ini sama sekali tak memuat kemiripan dengan Wonogiri yang lokasinya di barisan gunung kapur.

Dari Pegunungan ke Perairan

Bagi Dimas Nugroho yang lahir dan tumbuh di Wonogiri, kota yang dikelilingi perairan semacam Tual tentu fenomena baru. Selain perkara geografis, ia menyimpan gelisah pula perihal demografis. Penduduk mayoritas di Tual adalah pendatang dari bangsa Bugis, Buton, Jawa, dan Minang. Tak hanya itu, sebagai prajurit keuangan negara, ia dilimpahi tugas yang terbilang baru,



Dimas Nugroho,
TMR pada KPPN
Tual

Dimas pada
kegiatan
bimbingan teknis

Foto
Anas Nur Huda
Dok. Pribadi

Treasury Management Representative (TMR). Tak ada yang sederhana untuk perkara-perkara baru.

Dimas perlu belajar banyak hal sebelum mengoptimalkan peran. Ia perlu belajar adaptasi tinggal di wilayah kepulauan, ia perlu menyesuaikan lidahnya dengan cita rasa setempat, pun ia perlu belajar membereskan tugas sebagai TMR. Tugas TMR terbilang beragam, menyesuaikan pada seksi mana TMR ditempatkan. Sebagai TMR yang ditempatkan pada Seksi Bank, ia bertugas memberikan pendampingan distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Maluku Tenggara. Wilayah terjauh yang mesti ditempuh Dimas adalah Dobo, kota kecil di Kepulauan Aru. Dari kantornya, KPPN Tual--yang berlokasi di Langgur, Maluku Tenggara--ia perlu mengarungi lautan seluas kira-kira 200 kilometer. Perjalanan ini ia tempuh dalam kisaran delapan sampai sepuluh jam menggunakan kapal. Delapan jam terapung di lautan tentu perkara yang tidak sederhana, lebih-lebih bagi lelaki yang lahir dan tumbuh di wilayah pegunungan seperti Dimas.

Belum lagi, tak jarang ia menjumpai satuan kerja penerima DAK Fisik yang kurang kooperatif. "Kadang yang bikin agak kesal ada satker yang bandel," ia melanjutkan, "kadang saat diminta

segera sampaikan laporan, mereka mengiyakan tapi tak jua disampaikan laporannya." Kendati demikian, ia mengaku memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugas sebagai TMR. "Enaknya, ketika ada satker yang mengalami kendala, lantas berdasarkan solusi yang kita berikan sampai ke belakang bisa lancar, itu rasanya senang," kata pegawai muda ini.

Pekerjaan ini juga secara tak langsung memaksa Dimas untuk siap sedia selama 24 jam. Saat satuan kerja merasa perlu pendampingan, saat itu pula mereka bisa sewaktu-waktu menghubungi Dimas. "Pernah saya ditelepon setengah 12 malam," katanya. Ia melanjutkan, "Saat itu mereka sedang mengalami kendala. Ya sudah, saya layani." Menurutnya, tak setiap satuan kerja memiliki pengetahuan dan kompetensi yang bisa disetarakan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Karena itu, Dimas menyampaikan, kompetensi yang paling krusial dimiliki seorang TMR adalah pengetahuan mengenai perbendaharaan negara. Dengan kompetensi itu, TMR bisa menjadi pendamping bagi satuan kerja dalam mengelola pemanfaatan dana dari pemerintah pusat.

Upaya Memaksimalkan Dampak Anggaran

Pendampingan yang dilakukan Dimas Nugroho, adalah upaya negara untuk memastikan distribusi dan

pertanggungjawaban DAK Fisik dan Dana Desa. Pendampingan ini begitu penting, sebab apabila alokasi dana ini tidak dapat didistribusikan dengan optimal, tentu akan berpotensi memberikan dampak pada inefisiensi keuangan negara. Pada tahun 2019 saja, terdapat lebih dari 500 miliar rupiah alokasi DAK Fisik dan Dana Desa yang perlu terus dipantau oleh Dimas. Angka ini tersebar di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Untuk DAK Fisik di wilayah Kei Kecil dan Kei Besar saja, Dimas mengatakan ada 136 miliar rupiah yang perlu dimonitor distribusi dan pertanggungjawabannya. Belum lagi dana desa yang didistribusikan ke ratusan desa di wilayah kerjanya.

Alokasi DAK Fisik dan Dana Desa ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi besar Indonesia Maju 2045. Di Maluku Tenggara, alokasi dana ini dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana pendidikan, pembangunan jalan, serta pembangunan dan revitalisasi pasar. Berbagai pembangunan ini kelak akan menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Teks A. Wirananda

Super *Deduction Tax* Untuk Wujudkan SDM Indonesia Unggul

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

Di tahun 2020-2030, Indonesia akan menikmati bonus demografi dimana angkatan kerja Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi ini harus dipersiapkan secara matang agar bisa memberikan keuntungan bagi bangsa, yaitu dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lapangan kerja yang berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu sarana penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, siap pakai dan mampu bersaing di tingkat lokal dan mancanegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan program pendidikan vokasi yang *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha-dunia industri, sehingga langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran usia muda di era bonus demografi.

Lebih lanjut, melalui program pendidikan vokasi *link and match* ini diharapkan akan dapat mengurangi

kesenjangan (gap) kompetensi lulusan pendidikan/pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha-dunia industri. Sesuai dengan tujuannya, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang berorientasi pada keahlian dan kepakaran yang khas serta berkemampuan untuk siap kerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi mampu bersaing secara global karena fokus pada pengembangan keterampilan dan teknologi aplikatif. Dengan program pendidikan vokasi *link and match*, orientasi pendidikan/kepelatihan juga diubah dari yang semula *supply driven* menjadi *demand driven*. Dengan orientasi *demand driven* tersebut, dunia usaha-dunia industri tidak hanya berposisi sebagai pihak yang membutuhkan SDM, tetapi juga memiliki peran strategis untuk ikut terlibat secara aktif dalam rangkaian program pendidikan/pelatihan di Indonesia.



Ilustrasi
A. Wirananda

Insentif Pengurangan PPh

Sebagai upaya untuk menumbuhkan keterlibatan dunia usaha-dunia industri dalam program pendidikan/pelatihan ini, pemerintah memberikan insentif perpajakan, berupa pengurangan beban Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran pada kompetensi tertentu. Peserta praktik kerja/pemagangan adalah siswa dan pengajar sekolah menengah kejuruan (SMK) dan/atau madrasah aliyah kejuruan (MAK), mahasiswa dan pengajar pendidikan tinggi diploma vokasi, peserta latih dan tenaga kepelatihan di balai latihan kerja (BLK), dan/atau perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Dinas Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, WP badan dalam negeri menugaskan seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk mengajar di SMK/MAK, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, atau BLK.

Pada tanggal 6 September 2019, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 (PMK Nomor 128/2019) sebagai aturan super deduction tax untuk pendidikan vokasi. PMK Nomor 128/2019 merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk pendidikan vokasi, tetapi juga program pendidikan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 128/2019 disebutkan bahwa pengurangan beban PPh tersebut dapat dinikmati oleh WP dengan cara membebaskan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran sebesar 200 persen dari biaya riilnya. Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen tersebut

meliputi pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Hal ini juga meliputi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Secara detail, jenis biaya yang dapat dibebankan terdiri dari biaya penyediaan fasilitas fisik khusus pelatihan di tempat usaha WP, biaya barang/bahan, biaya instruktur, biaya honor bagi peserta praktik kerja/pemagangan, serta biaya sertifikasi peserta praktik kerja/pemagangan.

Syarat Mendapatkan Insentif

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Pertama, sudah melaksanakan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu. Kedua, memiliki perjanjian kerja sama. Ketiga, WP tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Keempat, telah menyampaikan surat keterangan fiskal, yakni keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai kepatuhan WP selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Terdapat ratusan jenis kompetensi yang dapat dinikmati melalui insentif ini yang dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tempat kompetensi diajarkan. Pertama, SMK dan/atau MAK untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Dalam kelompok pertama, terdapat 127 jenis kompetensi yang dapat menerima fasilitas. Sebagian besar di antaranya (73 kompetensi) di sektor manufaktur,

sedangkan sisanya tersebar di sektor kesehatan (7 kompetensi), agribisnis (30 kompetensi), serta pariwisata dan industri kreatif (7 kompetensi). Kelompok kedua, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Sebanyak 268 kompetensi tertentu yang dapat memanfaatkan insentif *super tax deduction*. Sektor manufaktur masih mendominasi (124 kompetensi). Sementara itu, sisanya tersebar di sektor kesehatan (31 kompetensi), agribisnis (64 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (26 kompetensi), serta ekonomi digital (23 kompetensi). Kelompok terakhir yaitu balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan. Sebanyak 58 jenis kompetensi dalam kelompok ini, yaitu meliputi 19 kompetensi di sektor manufaktur (19 kompetensi), agribisnis (15 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (13 kompetensi), ekonomi digital (7 kompetensi), dan pekerja migran (4 kompetensi). Dalam aturan ini juga mengatur kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan dilakukan oleh WP di tempat usaha WP. Hal tersebut menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka penguasaan keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Penutup

Dengan berbagai fasilitas *super deduction tax*, diharapkan dunia usaha-dunia industri ikut terlibat aktif dalam penciptaan kualitas SDM Indonesia sehingga diharapkan *gap* kualitas *supply* dan *demand* SDM menjadi berkurang, seiring meningkatnya kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Teks Budi Sulisty

Ilustrasi
A. Wirananda

Komitmen Tinggi Jadi Kunci



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Firman
Parlindungan
bersama istri
dan buah
hati mereka,
Inaya, saat
pengukuhan
gelar Doktor

Foto
dok. Pribadi

Usai mendengar vonis dokter, kaki Firman terasa limbung, seakan tak mampu menahan berat tubuhnya. Air mata yang jatuh barangkali tak cukup menggambarkan tentang remuk hatinya. Bayi kecilnya baru saja dilahirkan. Namun, kondisinya tidak baik-baik saja.

Inaya Zhafira, putri pertamanya, lahir kala Firman tengah menjalani studi di Negeri Paman Sam. Inaya divonis menderita Congenital Diaphragma Hernia (CDH). Kondisi kelainan napas, akibat perkembangan abnormal diafragma sejak janin terbentuk. Tingkat keterjadian bayi dengan CDH sebenarnya cukup jarang, hanya 1 dari 2.200 kelahiran. Namun hal itu diderita oleh bidadari kecilnya. “Bayi dengan kondisi ini hanya mempunyai *survival rate* sekitar 50 persen,” tutur Firman mengenang.

Firman Parlindungan adalah pemuda asal Aceh Barat yang tengah menjalani pendidikan doctoral di Ohio State University, Amerika Serikat. Saat tengah menggarap disertasi untuk program doctoralnya inilah, bidadari kecil yang telah dinantinya, lahir ke dunia. Namun, belum juga merayakan kegembiraannya, awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu diuji dengan kondisi langka yang diderita sang bayi.

Operasi besar dijalankan demi kesembuhan sang putri. Pascaoperasi, bayi kecil Firman dibawa ke ruang NICU untuk

menjalani perawatan intensif. Sementara sang istri perlu menjalani proses pemulihan pascamelahirkan. Tak kurang dari seratus hari, Firman terus siaga menjaga keluarga kecilnya di rumah sakit di Amerka Serikat. Kendati demikian, kondisi ini tak lantas menyurutkan semangat dan komitemenya untuk lulus tepat waktu.

“Sambil menunggu Inaya terbaring di ruang NICU dan menemani istri *recovery* pascalahiran, saya tetap mengolah data dan menulis disertasi di bangsal ataupun lobi rumah sakit,” kenangnya.

Masih lekat dalam ingatan, alasan utamanya membawa serta sang istri menuntut ilmu ke negeri orang. Tidak lain untuk memberikan dukungan secara sosial dan emosional baginya kala menyelesaikan studi. Nyatanya, hal itu betul-betul dia rasakan, sekalipun dalam kondisi yang tak ideal. Atas ikhtiarnya,

kondisi Inaya berangsur membaik. Firman bahkan mampu menuntaskan pendidikan doctoralnya empat tahun lebih cepat dari ketentuan yang ditetapkan LPDP.

Mengapa Amerika?

Sebelum berangkat ke Amerika, bidang yang digeluti Firman adalah Bahasa Inggris. Program sarjana dan pascasarjana dia tuntaskan di Universitas Islam Malang pada 2011 dan 2013. Dua tahun berselang, saat menjalani profesi dosen di Universitas Teuku Umar, Firman memutuskan untuk kembali belajar, melanjutkan program doctoral di Amerika Serikat.

Literasi jadi bidang yang dia minati. Firman menyebutkan, kualitas pendidikan di Aceh selama ini jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kampus tempatnya mengajarpun belum memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan S3, apatah lagi untuk lulusan luar negeri. Firman jadi satu-satunya calon doktor kala itu.

“Dalam konteks yang lebih luas, negara kita masih lemah dalam hal literasi,” ucapnya. Literasi yang dimaksudnya, bukan terbatas pada kemampuan baca tulis, melainkan literasi yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif, berpartisipasi di tingkat dunia, serta dalam penggunaan teknologi.

Itu sebabnya, Firman begitu termotivasi untuk kembali belajar. Namun, dia ingin merasakan pengalaman belajar yang berbeda dari sebelumnya. Maka, Pilihannya jatuh pada The Ohio State University (OSU) Amerika Serikat. Dikatakan Firman, OSU telah lama menjadi pusat referensi dunia untuk bidang literasi yang hendak ia geluti. “Mereka punya program Reading Recovery yang sudah berjalan lebih dari 50 tahun dan menjadi rujukan dunia,” ungkapnya.

Jalur afirmasi jadi jalan

Kendala teknis yang cukup

merepotkan dialami Firman saat hendak melamar beasiswa pendidikan LPDP. Wilayah Barat-Selatan Provinsi Aceh, tempatnya berdomisili, memang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Akibatnya, Firman kesulitan melengkapi persyaratan beasiswa karena keterbatasan akses yang dia miliki.

Beruntung, LPDP membuka jalur afirmasi yang memudahkan akses beasiswa bagi calon *awardee* yang berada di wilayah 3T sepertinya.”Ide jalur afirmasi ini sangat cerdas dan merakyat. Patut mendapat apresiasi yang besar,” tuturnya bersemangat. Melalui jalur afirmasi, Firman dapat melakukan pendaftaran melalui pos. Sementara untuk tahap wawancara, LPDP mendatangi langsung tempat calon *awardee* berada.

Kesempatan pendanaan konferensi

Terkait konferensi internasional, pemuda yang juga aktif sebagai panitia sejumlah konferensi internasional ini begitu berharap agar ke depan, LPDP bisa memberikan kelonggaran persyaratan terkait pendanaan bantuan konferensi. Menurut Firman, saat ini kebijakan pendanaan hanya diberikan kepada *awardee* yang menjadi pembicara dan makalahnya terbit dalam prosiding terindeks Scopus.

“(Padahal), budaya konferensi di AS biasanya tidak menerbitkan prosiding. Jikapun ada, jarang sekali yang menyebutkan bahwa prosiding akan terindeks Scopus, seperti di Indonesia,” ungkapny. Meski tidak terindeks Scopus, konferensi di AS diselenggarakan oleh asosiasi profesi kelas dunia. “Untuk bidang saya, misalnya (diselenggarakan) oleh International Literacy Association (ILA), American Educational Research Association (AERA) dan masih banyak lagi,” sebut pria yang juga dipercaya menjadi senat guna mewakili jurusannya. Sayangnya, kesempatan pendanaan

konferensi tersandung syarat tersebut.

Firman juga berharap kesempatan pendanaan tidak dibatasi pada lima orang pertama untuk satu acara konferensi. Hal ini mengingat penerima beasiswa LPDP telah mencapai puluhan ribu orang. Boleh jadi dalam satu bidang, terdapat ribuan orang *awardee*. Akibatnya kesempatan memperoleh pendanaan konferensi semakin kecil.

Maju jalan

Tuntas merampungkan pendidikan, kini Firman kembali mengabdikan sebagai tenaga dosen di Universitas Teuku Umar. Bersama sejumlah alumni LPDP di Meulaboh, Aceh Barat, pemuda yang sebelumnya aktif dalam Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias) ini, juga menjalankan sejumlah program strategis di tanah kelahirannya itu.

“Salah satunya mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan bernama Global Institute Meulaboh,” ceritanya. Lembaga ini berfokus pada penguatan keterampilan berbahasa Inggris, serta penggunaan sejumlah perangkat lunak teknis, seperti SAP-2000, GIS dan AutoCad.

Ke depan, Firman bersama rekan-rekan dari Indonesia Extensive Reading Association hendak menggelar *roadshow* ke seluruh Indonesia. Program yang diusung tentu saja terkait penguatan literasi. “Kita ingin Indonesia maju, melalui gerakan akar rumput di tingkat lokal dan gerakan masif di tingkat nasional,” tandasnya. Komitmennya ini menjadi tanda syukur atas kesempatan pendidikan tinggi yang telah diperolehnya. Termasuk juga kesempatan dari Sang Maha sehingga dapat berkumpul bersama keluarga kecilnya dalam kondisi sehat seperti sekarang.

Teks Farida Rosadi

AIFEE

The 9th Annual International Forum on Economic Development
and Public Policy

THRIVING INDONESIA :
REINFORCING STRATEGIES TO BOOST PRODUCTIVITY
AND INCREASE COMPETITIVENESS

Nusa Dua Bali, 5-6 December 2019

Live Streaming

www.bppk.kemenkeu.go.id
www.fiskal.kemenkeu.go.id/live



 Bugar

Sadar Kesehatan Jiwa

Teks Yani Kurnia Astuti

Demam film Joker karya sutradara Todd Phillips yang dirilis beberapa waktu lalu nampaknya kembali mengingatkan kita pada isu kesehatan jiwa. Problem kesehatan jiwa memang masih kurang menjadi perhatian di Indonesia, meski tren persoalan kasus tersebut meningkat.

Dilansir dari website Kementerian Kesehatan, tahun ini World Federation of Mental Health (WFMH) menetapkan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia “Mental Health Promotion and Suicide Prevention” atau Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri. Tema tersebut didasarkan pada prevalensi bunuh diri yang kian meningkat. Menurut data WHO, lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar 1 orang setiap 40 detik karena bunuh diri.

Merujuk pada Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2018, prevalensi orang gangguan jiwa berat (skizofrenia/psikosis) meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%, sementara prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun keatas meningkat dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 9,8 persen pada 2018.

Risiko bunuh diri akan semakin meningkat apabila depresi seseorang tak tertangani. Upaya-upaya pencegahan sebenarnya dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat jika mengetahui ada relasi atau anggota keluarganya mengalami gejala depresi. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan?

Sekretaris PP Perhimpunan Dokter Spesiali Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr. Agung Frijanto mengatakan gejala depresi dapat dilihat dari 3 aspek,

antara lain afek, kognitif, dan fisik. Gejala depresi pada Afek dapat ditandai dengan sedih, hilangnya minat, iritabilitas, apatis, anhedonia, tak bertenaga, tak bersemangat, isolasi sosial, dan aniestas.

Gejala depresi secara kognitif dapat dicirikan dengan rendah diri, konsentrasi menurun, daya ingat menurun, ragu-ragu, rasa bersalah, ide bunuh diri. Selain itu, secara fisik dapat dilihat dari psikomotor menurun, fatigue atau kelelahan akut, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, dan hasrat seksual menurun.

Apabila mendapati teman atau kerabat di sekitar kita terdeteksi gejala-gejala tersebut, sangat disarankan untuk dapat berkonsultasi dengan layanan kesehatan terdekat. Berkat kemajuan teknologi, saat ini

berbagai layanan konseling pun dapat diakses secara online, sebagai contoh aplikasi Sehat Jiwa yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan dapat diunduh secara gratis atau situs-situs dan aplikasi penyedia jasa konseling daring yang lain seperti Psyline atau KALM. Berbagai situs dan aplikasi tersebut menyediakan beragam layanan termasuk konsultasi mengenai penyesuaian diri, pengendalian emosi, hingga penanganan trauma.

Setiap orang perlu meningkatkan kepedulian antar sesama. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting dalam hal pencegahan depresi yang lebih parah. Tak hanya dalam keluarga, upaya pencegahan harus juga dilakukan di lingkungan lain seperti sekolah dan lingkungan kerja.



Foto
Anas Nur
Huda

Ilustrasi
A. Wirananda

Menjadi Pemenang

Foto
Resha Aditya
Pratama

Langit tak selalu cerah, awan pun tak selalu mendung. Waktu pun terus berputar dan beragam problematika hidup mewarnai baik suka maupun duka. Adalah duka yang paling tidak diinginkan manusia. Tak ada satupun dari kita yang menghendaki badai kehidupan itu datang hingga menimbulkan duka yang mendalam.

Cobaan dan ujian adalah keniscayaan. Banyak orang mengatakan bahwa ujian dan cobaan adalah badai kehidupan. Setiap diri percaya bahwa badai kehidupan yang dialami setiap orang pasti berbeda derajatnya. Ada yang diuji dengan harta, pasangan hidup, anak, karier dan sebagainya. Hal yang paling menyesakkan adalah kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang. Seperti resesi ekonomi, badai kehidupan ibarat ‘pencuri’ yang datang di malam hari. Ibarat sebuah pohon, semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin yang menerpa. Hanya jika pohon itu bisa bertahan maka semakin tumbuh besar dan kokohlah pohon itu. Satu hal yang pasti adalah ketika badai kehidupan itu

datang, kita harus bersiap.

Ujian dan cobaan dalam kehidupan tidak akan pernah berhenti selama kita masih bernafas. Perputaran roda kehidupan begitu cepat, membuat kita terkadang tidak siap. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus sesuai kehendak kita, tetapi kita perlu merasa yakin bahwa kehendak-Nya adalah yang terbaik. Permasalahan muncul ketika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ekspektasi yang ditetapkan terlampau tinggi sehingga kita merasa hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Tak dapat dipungkiri, manusia hidup pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Terlepas dari itu semua, problematika hidup harus dihadapi dengan hati gembira sehingga masalahnya akan menjadi lebih ringan. Apa yang terjadi jika kita terlampau bersedih hati saat masalah menghampiri? Pasti kita akan semakin sedih dan berbeban berat. Tetapi, jika kita mencoba untuk tersenyum, kita akan memiliki kekuatan lebih untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Yakin dan optimis bahwa semua

permasalahan pasti ada solusinya.

Ketika badai kehidupan datang, penting untuk menumbuhkan rasa percaya bahwa selalu ada hikmah di balik setiap ujian dan cobaan yang diberikan. Yakin bahwa di setiap kejadian yang bukan kuasa kita, pasti selalu ada hikmah. Mungkin kita melihatnya buruk, tetapi Tuhan mungkin melihatnya baik untuk kita. Seiring berjalannya waktu, mungkin kita baru akan menyadarinya.

Kita dapat dikatakan berhasil menjadi seorang pemenang kehidupan apabila kita telah berhasil melewati setiap episode hidup yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Sebaliknya, kita akan menjadi pecundang apabila kita memutuskan untuk berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang melewati setiap badai kehidupan yang datang. Tetaplah tersenyum walaupun itu berat. Sebab, dengan tersenyum, akan membuat kita lebih kuat dan tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan seberat apapun. Bukankah kita dilahirkan untuk menjadi pemenang kehidupan?

Teks Lutfiana Nadzroh

Kisah Pegawai Kemenkeu Merajut Persatuan

Buku Perekat Indonesia ini adalah terbitan internal Kementerian Keuangan. Sebuah kumpulan cerita yang disusun dari kisah nyata dan contoh perilaku jajaran Kementerian Keuangan dalam upayanya meningkatkan daya rekat sosial kemajemukan, baik dalam pelaksanaan tugasnya, maupun dalam keseharian. Petikan kisah-kisah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan agar kita sebagai warga negara yang juga sekaligus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (baik di dunia nyata maupun dunia maya), tidak ikut terpancing pada aktivitas- aktivitas yang dapat merusak ketahanan NKRI, menjaga netralitas ASN, dan jangan sampai kita terpecah belah atau bahkan termasuk orang-orang yang ikut memecah belah rumah kita, Indonesia.

Kumpulan kisah pegawai Kemenkeu ini diluncurkan oleh Menteri Keuangan bersama Sekretaris Jenderal dalam rangkaian acara Festival Literasi (Feslit) 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang digelar oleh Perpustakaan Kemenkeu di aula Dhanapala pada 30 September s.d. 4 Oktober 2019 lalu. Buku yang lebih pas disebut novel ini disusun oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) Sekretariat Jenderal. Di dalamnya terdapat kisah-kisah inspiratif pegawai Kemenkeu dalam mengimplementasikan Gerakan Indonesia Bersatu baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Istimewanya, buku ini disusun keluar dari pakem terbitan pemerintah khususnya Kemenkeu yang selama ini cenderung akademis, formal, atau terkadang kaku. Perekat Indonesia membawa suasana bagi pembaca untuk meningkatkan daya rekat sosial kemajemukan dan kebinekaan di Indonesia dengan Bahasa dan alur cerita yang ringan.

Ada 63 kisah dan contoh nyata perilaku pejabat/pegawai dari seluruh Unit Eselon I, di lingkungan Kemenkeu. Kisah tersebut menceritakan pengabdian mereka yang tersebar dari Sabang-Merauke, serta dari Miangas - Pulau Rote, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun di luar dinas. Cerita mereka diharapkan dapat menginspirasi segenap jajaran Kemenkeu lainnya, dan masyarakat pada umumnya, tentang bagaimana membangun kembali dan merekatkan semangat persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana sila ke-3 Pancasila “Persatuan Indonesia”.

Buku yang terbagi ke dalam 11 tema ini memiliki desain sampul yang menarik. Perekat Indonesia diilustrasikan menjadi peta dengan laut yang merekatkan pulau-pulau di Indonesia. Sebuah analogi dari Kemenkeu yang ikut berkontribusi sebagai perekat Indonesia, sebagai garam kebhinekaan dalam semangat persatuan. Hal lain adalah upaya mendorong perilaku yang mendukung kesadaran untuk bersatu dalam semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, dan keadilan sosial.

Salam literasi, selamat membaca,

Peresensi Hega Susilo



Judul:
Perekat Indonesia: Kisah Inspiratif Gerakan Indonesia Bersatu di Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerbit:
Kementerian Keuangan

Tahun Terbit:
2019

Dimensi:
350 Halaman

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat



Perpustakaan
Kemenkeu

Perpustakaan
Kementerian
Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 The Art of Stillness: Adventures in Going
Pyco Lyer
- 2 Orang-Orang Biasa
Andrea Hirata
- 3 How We'll Live on Mars
Stephen Petranek
- 4 Tapak Jejak
Fiersa Besari
- 5 #MO: Sebuah Dunia Baru yang Membuat
Orang Gagal Paham
Rhenald Kasali

Kilau Batu Intan Martapura



Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah. Kita dapat menemukan berbagai batu mulia khas nusantara seperti batu bacan, kecubung, safir, topaz, hingga zamrud. Di Martapura, Kalimantan Selatan, kita dapat menemukan batu intan nan berkilau.

Penghasil Intan Kualitas Tinggi

Martapura selama ini dikenal sebagai

penghasil batu intan terbesar di Indonesia. Dari Banjarmasin, saya butuh waktu sekitar satu jam untuk sampai di kota ini. Dahulu Martapura bernama Kayutangi dan menjadi ibu kota Kesultanan Banjar. Kota ini dijuluki Kota Intan. Batu-batu intan yang berkualitas tinggi berasal dari sekitar Sungai Martapura. Masyarakat setempat menambang batu-batu tersebut secara tradisional.

Para penambang bekerja

berkelompok, terdiri atas sekitar delapan hingga sepuluh orang. Mereka biasa mendulang intan menggunakan alat yang disebut *linggang*. Alat ini sekilas mirip caping petani tetapi berukuran lebih besar. Bebatuan di dasar sungai disedot dengan pompa. Selanjutnya, batuan tersebut dibersihkan dengan cara disiram air lalu dimasukkan ke dalam *linggang*. Oleh para penambang, *linggang* digoyang-goyangkan untuk mencari batu intannya.

Selain sebagai penghasil intan, kota ini juga menjadi pusat transaksi jual beli batu mulia di Indonesia. Di tengah kota terdapat monumen bernama Prasasti Intan dengan sebuah replika batu intan berukuran besar di sampingnya.

Berkunjung ke Pasar Intan Martapura

Karena penasaran, saya sangaja datang ke Pasar Intan Martapura untuk melihat berbagai jenis batu intan di sana. Pasar ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Pasar yang menempati bangunan dua lantai ini ramai pembeli, terutama saat akhir pekan. Ada lebih dari 80 toko yang terbagi dalam empat blok besar. Lantai pertama berisi toko-toko yang menjual berbagai jenis perhiasan batu intan, sedangkan lantai dua berisi kios-kios yang menjadi *workshop* atau tempat pembuatan perhiasan-perhiasan tersebut.

Para perajin perhiasan dari batu intan bekerja dengan tekun. Berbekal berbagai alat-alat seperti solder, gerinda, dan tang mereka membuat perhiasan dengan teliti dan presisi. Pengunjung boleh melihat dari dekat proses pembuatan perhiasan tersebut sembari bertanya tentang jenis-jenis batu mulia yang sedang dikerjakan.

Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau

Batu intan yang dijual di pasar ini biasanya sudah diolah menjadi berbagai jenis perhiasan seperti cincin, kalung, atau anting. Perhiasan yang paling banyak diminati adalah cincin. Tak hanya dari batu intan, ada pula perhiasan yang berbahan batu jenis lain seperti merah delima, zamrud, *tashmarine*, biduri bulan, rubi, giok, dan mutiara.

Harga perhiasan di Pasar Intan Martapura berkisar puluhan ribu hingga jutaan, tergantung keunikan atau kelangkaan batu mulia yang digunakan. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual perhiasan ini di luar Martapura. Tak heran banyak pedagang perhiasan yang membeli dalam jumlah banyak di pasar ini untuk dijual



lagi di kota-kota lain dengan harga yang tentunya lebih mahal.

Di bagian luar pasar, saya menjumpai penjual-penjual yang menjajakan berbagai macam perhiasan yang ditaruh dalam nampan. Sekilas mirip pedagang asongan. Namun jangan salah, mereka bukan pedagang asongan biasa. Omzet transaksi mereka bisa mencapai jutaan dalam sehari. Mereka memang sengaja melakukan transaksi seperti itu daripada menyewa kios di dalam pasar. Dengan cara ini, mereka jemput bola menemui calon pembeli.

Cek Keaslian Batu Mulia

Di salah satu sudut pasar, terdapat sebuah gerai yang menyediakan jasa pengecekan dan pengujian keaslian batu mulia. Namanya *South Kalimantan Gem Laboratory*. Pembeli tak perlu khawatir jika ingin membeli perhiasan dengan harga mahal. Sebelum bertransaksi, bawa dulu batunya ke tempat ini untuk diuji. Proses pengecekan dan pengujian tak begitu lama, bisa ditunggu di tempat.

Bagaimana, tertarik singgah dan membeli batu intan khas Martapura?

Teks dan Foto Adhi Kurniawan

Ide Sederhana Atur Keuangan Anda

Banyak orang enggan mengurus keuangan pribadinya. Inilah mengapa, saat ini profesi perencana keuangan tumbuh karena kebutuhan masyarakat yang memang makin tinggi. Padahal, sejatinya mengurus keuangan pribadi tidak terlalu rumit, tetapi memang membutuhkan ekstra waktu. Kali ini, akan disampaikan tips buat Anda agar Anda bisa menyederhanakan urusan keuangan secara praktis.

Pertama, buang dokumen yang tidak penting. Anda pasti sering bertemu dengan orang yang hobi mengoleksi dokumen bank seperti penawaran dari bank, menyimpan bukti transaksi ATM padahal sudah setahun berlalu, dan sebagainya. Jika itu terjadi dengan Anda, sangat disarankan Anda memulai dengan membuka tong sampah dan membuang semua berkas yang tidak penting tadi. Memang, hal ini tidak berhubungan langsung dengan keuangan. Tetapi, semakin banyak dokumen keuangan yang menumpuk hanya akan membuat pola pikir keuangan Anda makin rumit.

Kedua, rasionalisasi tujuan keuangan Anda. Membuat tujuan keuangan adalah salah satu langkah wajib yang disarankan oleh semua perencana keuangan. Jika Anda sudah membuat tujuan keuangan Anda,

tolong dievaluasi lagi dan disesuaikan dengan kapasitasnya. Target yang tinggi itu bagus, tetapi jika terlalu tinggi justru akan membuat Anda tidak bisa mengatur keuangan pribadi dengan nyaman. Hitung pemasukan dan pengeluaran Anda setiap bulan. Jika sudah, Anda akan dapat menentukan *saving* dan investasinya.

Langkah berikutnya, gunakan hanya satu kartu kredit. *One for all, all for one*. Pindahkan juga pelaporan kartu kredit Anda menjadi elektronik. Selain mendukung gerakan Indonesia lebih hijau, tagihan secara elektronik juga tidak akan meribetkan Anda untuk merapikan berkas. Apalagi, jika Anda teledor sembarangan membuang data laporan kartu kredit Anda, bisa-bisa dokumen tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi Anda yang malas dengan keribetan tagihan kartu kredit, selalu siapkan uang tunai di dompet. Berusahalah membayar belanjaan di mal secara *cash*.

Langkah ke-empat, pilihlah investasi dan asuransi yang mudah. Untuk investasi saham, tentu Anda harus belajar sampai ke seluk-beluknya. Sebagai alternatif investasi yang lebih sederhana, Anda dapat memilih reksa dana. Dengan pilihan reksa dana yang cermat, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara pengelolaan dana karena ada manajer investasi yang akan

membantu menginvestasikan dana Anda. Kemudian, pilihlah asuransi yang tepat untuk Anda. Perlu diingat bahwa konsep asuransi adalah uang yang rela untuk dihilangkan. Sehingga, ketika aset Anda sudah di-cover pihak asuransi, harapannya Anda tidak akan perlu lagi pusing jika sesuatu yang buruk menimpa Anda. Namun demikian, tetap perhatikan cara memilih asuransi yang benar, agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada pembayaran preminya.

Poin terakhir, saat ini zaman sudah maju dan semua berbasis teknologi. Teknologi pun bisa menjadi solusi investasi Anda. Sebagai contoh, Anda dapat meminta bantuan perusahaan efek untuk memotong sekian Rupiah dari gaji Anda setiap bulan untuk diinvestasikan di reksadana. Begitu juga ketika Anda perlu membayar kartu kredit, Anda sudah bisa melakukan *auto* debet dari rekening Anda secara langsung tiap bulannya. Namun demikian, semuanya akan tetap ribet jika Anda masih berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, mari bangkit dari ranjang dan eksekusi semua rencana keuangan yang sudah Anda susun.

Andhika Diskartes,
Perencana Keuangan, founder diskartes.com,
dan penulis buku *Investory* dan buku *Investory "X"*.

Mas Praim

“CAFE BARU”

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





HARI POHON SEDUNIA
21 NOVEMBER 2019

Foto:
Anas Nur Huda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA